



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS PERTANIAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas taufik dan petunjukNya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 dapat di selesaikan. Rencana Strategis merupakan proses pembelajaran yang dapat digunakan dan bermanfaat, diantaranya sebagai bahan menentukan kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Tapin selama tiga tahun ke depan untuk mencapai keberhasilan yang di inginkan.

Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Disadari bahwa penyusunan Rencana Strategis ini masih belum sempurna, sehingga kritik dan saran dari semua pihak akan menjadi masukan yang dapat memperbaiki penyusunan di masa datang.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini, semoga semua rencana dapat bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT sehingga dapat terlaksana dengan baik.

KEPALA DINAS,

drh. MOHAMMAD TRIASMORO

NIP. 19670825 200604 1 002

DAFTAR ISI

KATA PEN	GANTAR	ii
DAFTAR IS	SI	. iii
DAFTAR TA	ABEL	v
DAFTAR G	AMBAR	1
BAB I PEN	DAHULUAN	2
1.1 Lata	ar Belakang	2
1.2 Lan	dasan Hukum	6
1.3 Mal	ksud dan Tujuan	11
1.3.1	Maksud	11
1.3.2	Tujuan	12
1.3.3	Sistematika Penulisan	14
BAB II GAI	MBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGI	S	18
2.1 Gar	nbaran Pelayanan	18
2.1.1 Tu	ıgas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian	22
2.1.2 Su	ımber Daya Dinas Pertanian	31
2.1.3 Ki	nerja Pelayanan	40
2.1.4 Ke	elompok Sasaran Layanan	45
2.2Perm	nasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	. 46
2.2.1 Pe	rmasalahan pelayanan perangkat daerah	47
2.2.2 Pe	nentuan Isu-isu Strategis	49
2.2.3 Ta	ntangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian	49
2.2.4 Pe	eluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian	50
2.2.5 Id	entifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Pelayan	an	50
2.2.6 Te	laahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian	0
Lingkun	ngan Hidup Strategis (KLHS)	52
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61

3.1	Tujuan dan Sasaran	61
3.2	Strategi dan Arah Kebijakan	64
3.3 Kepal	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil a Daerah Terpilih	73
3.4	Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI	75
BAB IV	V PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYE	ELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
4.1	Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra	78
4.2	Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pag	gu
indika	atif 1	01
4.3	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 1	28
PENU	TUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 18
Tabel 2.2 Keragaan ASN Dinas Pertanian Tahun 2025
Tabel 2.3 Data Jabatan Struktural PNS Dinas Pertanian Tahun 2025 37
Tabel 2.4 Data Jabatan Fungsional PNS Dinas Pertanian Tahun 2025 37
Tabel 2.5 Rekapitulasi laporan Aset Tetap Menurut Intrakomptabel Dinas
Pertanian Akhir Tahun 2024
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Layanan Dinas Pertanian
Tabel 2.7 Analisis SWOT
Tabel 2.8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah 57
Tabel 3.9 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian
Kabupaten Tapin
Tabel 3.10 Penahapan Renstra Perangkat Daerah
Tabel 3.11 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 69
Tabel 4.12 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD
Tabel 4.13 Rencana Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan 102
Tabel 4.14 Indikator Kinerja Dinas Pertanian yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran Renstra 129
Tabel 4.15 Indikator Kinerja Bidang Urusan Dinas Pertanian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan RPD dan Renstra PD	6
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian kabupaten Ta	apin31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ini adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dari sebuah SKPD. Renstra SKPD disusun berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahunan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundangundangan. Secara umum, Renstra adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah untuk periode lima tahun, berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau Daerah (RPJMD). Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2023, Renstra disusun sebagai penjabaran lebih operasional dari sasaran strategis RPJMN, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dalam lingkup instansi yang bersangkutan.

Penyusunan Renstra juga merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya keterpaduan, keterkaitan, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga kategori: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. urusan Pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten/kota meliputi:

Pembangunan sektor pertanian merupakan salah satu prioritas strategis dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Kabupaten Tapin memiliki potensi pertanian yang besar, baik di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun peternakan. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi seperti alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, produktivitas rendah, serta lemahnya kelembagaan petani dan pasca panen.

Dalam kurun waktu 2020–2024, Dinas Pertanian telah menunjukkan capaian kinerja yang cukup signifikan, seperti peningkatan produksi padi dan hortikultura, serta pertumbuhan populasi ternak. Meski demikian, berbagai permasalahan yang diidentifikasi pada periode sebelumnya masih membutuhkan perhatian khusus dan strategi keberlanjutan dalam periode mendatang.

Seiring dengan berakhirnya masa periode RPJMD sebelumnya dan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Tapin 2025–2029 serta RPJPD 2025–2045, maka penyusunan Renstra Dinas Pertanian 2025–2029 menjadi keharusan sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang terpadu. Dokumen ini disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan merupakan bagian integral dari upaya mengarahkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pertanian secara sistematis, terarah, dan akuntabel.

Renstra ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam menyelaraskan urusan pertanian yang diampu oleh perangkat daerah dengan visi dan misi Kepala Daerah, serta memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan pertanian dapat berjalan efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Tapin ini adalah dokumen perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Tapin untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa tiga tahun tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Tapin berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tapin ini adalah :

- 1. Menjadi acuan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
- 2. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
- 3. Menjadi acuan penyusunan LKIP Dinas Pertanian Kabupaten Tapin

Dokumen Renstra ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang pada penyusunannya memperhatikan perencanaan pembangunan pertanian ke depan sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan dan hortikultura serta ketahanan pangan periode 2025-2029 RENSTRA 2025-2029

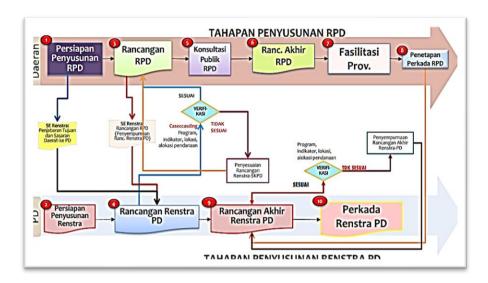
Dinas Pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik didalam maupun antar sektor terkait. Mengingat peran dan fungsi Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tapin ini sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Renstra dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian. Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029.

Usaha mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan Strategis umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

Dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam Renja, KUA dan PPAS dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dan arah kebijakan yang termasuk di dalam Renstra lima tahunan.

Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara Strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program Strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD.



Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan RPD dan Renstra PD

2.1 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

- 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nommor 33 Tahun 2018

- tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
- 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04)
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11);
- 33. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042;
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
- 35. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor : 000.7.2/152-Randal/Bappelitbang/2025 Perihal Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

.

- 36. Perda Nomor 3 Tahun 2025 Lembaran Daerah Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142 Tangggal 14 Agustus 2025 Tentangrpimd Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03) Tangggal 20 Agustus 2025
- 38. Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 31) tanggal 19 September 2025

2.2 1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian adalah agar menjadi acuan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pertanian yang diemban oleh seluruh Maksud penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tapin adalah:

- a. Sebagai penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin dalam urusan
 pertanian
- Sebagai dokumen perencanaan yang mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas pertanian Kabupaten Tapin selama periode 5 tahun
- c. Untuk menyusun dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tapin
- d. Sebagai instrumen koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappelitbang dan pemangku kepentingan terkait dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk menyiapkan dokumen perencanaan yang operasional sebagai

- 1. Dokumen perencanaan yang mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertnian Kabupaten Tapin selama periode 5 tahun;
- 2. Pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Tapin untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra dan RPJMD;
- 3. Instrumen akuntabilitas kinerja yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan laporan kinerja;
- 4. Dokumen yang memuat komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Tapin dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah
- 5. Alat untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas daerah di bidang pertanian
- 6. Sarana untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan dalam bidang pertanian
- 7. Instrumen untuk menyelaraskan program dan kegiatan Dinas pertanian dengan kebijakan nasional dan daerah dalam sektor pertanian ;
- 8. Terwujudnya keselarasan dalam antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dengan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029
- 9. Menjadikan pedoman dalam penyusunan Renja tahunan agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

10. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

1.3.3 Sistematika Penulisan

Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Tahun 2025- 2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum Daerah, pembentukan Perangkat struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme). Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, untuk urusan pilihan, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan kesinambungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, tujuan dan sasaran, serta kebutuhan pendanaan indikatif. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. berdasarkan identifikasi Selanjutnya permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktorfaktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/ kabupaten/ kota.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELARASAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuandan sasaran yang akan dicapai. Serta memuat indicator kinerja perangkat daerah, termasuk indikator kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masingmasing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3 Gambaran Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pembagian urusan pemerintah daerah bidang pertanian dan bidang pangan dibagi sesuai urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, antara lain yang tertuang pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

No.	Urusan/Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1	Sarana	a. Standardisasi,	a. Pengawasan	a. Pengawasan
	Pertanian	dan	peredaran	penggunaan
		pengawasan	sarana pertanian.	sarana
		mutu/formula	b. Penerbitan	pertanian.
		sarana	sertifikasi dan	b. Pengelolaan
		pertanian.	pengawasan	SDG hewan
		b. Penetapan	peredaran	dalam Daerah
		kebutuhan	benih tanaman.	kabupaten/kota.
		sarana pertanian.	c. Pengelolaan SDG	c. Pengawasan
		c. Penetapan	hewan	mutu dan
		standar mutu	yang terdapat pada	peredaran
		benih/bibit,	lebih	benih/bibit
		sumber daya	dari 1 (satu)	ternak dan
		genetik (SDG)	Daerah	tanaman
		hewan	kabupaten dalam 1	pakan ternak
		(rumpun/galur	(satu)	serta pakan
		ternak).	Daerah provinsi.	dalam Daerah
		d. Penerbitan	d. Pengawasan	kabupaten/kota.
		sertifikasi	benih ternak,	d. Pengawasan
		benih/bibit ternak,	pakan, HPT dan	obat hewan di
		pakan, hijauan	obat	tingkat pengecer.
		pakan	hewan.	e. Pengendalian
		ternak (HPT) dan	e. Pengawasan	penyediaan
		obat	mutu dan	dan peredaran
		hewan.	peredaran	benih/bibit
		e. Penerbitan	benih/bibit	ternak, dan
		nomor izin	ternak dan	hijauan pakan
		pendaftaran obat	tanaman pakan 4 5	ternak dalam
		hewan.	e. Penerbitan	Daerah
		f. Penerbitan	nomor izin	kabupaten/kota.
		sertifikasi	pendaftaran obat	f. Penyediaan
			hewan.	benih/bibit

No.	Urusan/Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah
		cara pembuatan	f. Penerbitan	Kabupaten/Kota ternak dan
		obat	sertifikasi	hijauan pakan
		hewan yang baik	cara pembuatan	ternak yang
		(CPOHB) dan cara	obat	sumbernya
		pembuatan pakan	hewan yang baik	dalam 1 (satu)
		yang baik (CPPB).	(CPOHB) dan cara pembuatan pakan	
		g. Pengawasan	yang	
		produksi	baik (CPPB).	
		dan peredaran obat	g. Pengawasan	
		hewan di tingkat	produksi	
		produsen dan importir.	dan peredaran obat hewan di tingkat	
		h. Pengendalian	produsen dan	
		penyediaan	importir.	
		dan peredaran	h. Pengendalian	
		benih/bibit ternak,	penyediaan	
		dan	dan peredaran	
		hijauan pakan ternak.	benih/bibit ternak, dan	
		i. Penyediaan	hijauan pakan	
		benih/bibit	ternak.	
		ternak dan hijauan	i. Penyediaan	
		pakan ternak yang	benih/bibit	
		sumbernya dari impor.	ternak dan hijauan pakan ternak yang	
		mipor.	ternak serta pakan	
			di	
			lintas Daerah	
			kabupaten/kota	
			dalam	
			1 (satu) Daerah provinsi.	
			f. Pengawasan	
			peredaran	
			obat hewan di	
			tingkat	
			distributor. g. Pengendalian	
			penyediaan	
			dan peredaran	
			benih/bibit	
			ternak, dan	
			hijauan pakan ternak lintas	1000
			Daerah	1000
			kabupaten/kota	200000
			dalam	97771
			1 (satu) Daerah	
			provinsi.	10000
			j. Penyediaan benih/bibit	10 FRANCE
			ternak dan hijauan	150000 VS
			pakan	
			ternak yang	9
			sumbernya	

No.	Jrusan/Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			dari Daerah provinsi lain.	
	asarana rtanian	a. Penentuan kebutuhan	a. Penataan prasarana	a. Pengembangan
		prasarana pertanian. b. Penetapan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. c. Penetapan kawasan peternakan.	pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah	prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan lahan penggembalaan
He Kes Ma	sehatan wan dan sehatan asyarakat teriner	a. Upaya penyehatan hewan, penetapan daerah wabah dan status situasi penyakit hewan menular di Indonesia. b. Penetapan dan penerapan persyaratan teknis kesehatan hewan. c. Penetapan persyaratan teknis pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner. d. Penetapan otoritas veteriner dan siskeswanas. e. Penetapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. f. Penetapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. f. Penetapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi. c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan. d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan

No.	Urusan/Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	g. Penetapan persyaratan teknis kesejahteraan hewan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian nasional.	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi.	pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.
5	Perizinan Usaha Pertanian	a. Pendaftaran pakan, produk hewan, alat mesin peternakan, alat mesin kesehatan hewan dan obat hewan. b. Penerbitan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, benih/bibit ternak dan tanaman pakan, bahan pakan dan pakan keluar dan ke dalam	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi.	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.

Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Pertanian memiliki kewenangan dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penggunaan sarana pertanian guna memastikan efektivitas dan ketepatan penggunaan input pertanian di lapangan. Selain itu, mereka juga berwenang dalam pengembangan prasarana pertanian yang mendukung peningkatan produktivitas, serta pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terjadi di wilayahnya.

Di bidang peternakan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan serta wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. Mereka juga bertugas mengawasi mutu dan peredaran benih atau bibit ternak,

tanaman pakan ternak, serta pakan itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah pengawasan terhadap obat hewan, khususnya pada tingkat pengecer.

Pemerintah kabupaten/kota turut berperan dalam penyediaan benih atau bibit ternak serta hijauan pakan ternak yang berasal dari sumber di dalam wilayahnya. Dalam rangka mendukung keberlanjutan peternakan, pengembangan lahan penggembalaan umum juga menjadi bagian dari kewenangan daerah.

Dalam aspek kesehatan hewan dan veteriner, pemerintah kabupaten/kota berwenang menjamin kesehatan hewan, termasuk menetapkan pembukaan dan penutupan daerah wabah penyakit hewan menular. Mereka juga bertugas mengawasi pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan ke dan dari wilayahnya. Tak kalah penting, pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner juga dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk penerapan dan pengawasan terhadap persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Di sisi perizinan, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin usaha pertanian yang seluruh kegiatan usahanya berada dalam wilayah kabupaten/kota. Termasuk juga izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan, pasar hewan, serta rumah potong hewan.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin disebutkan bahwa Dinas Pertanian mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Pertanian mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- 1. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- 2. penyusunan programa penyuluhan pertanian;
- 3. pengembangan prasarana pertanian;
- 4. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- 5. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- 6. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- 7. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- 8. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- 9. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- 10. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- 11. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- 12. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- 13. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
- 14. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- 15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Tapin terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat:
- 3. Bidang Prasarana Dan Sarana;
- 4. Bidang Tanaman Pangan;
- 5. Bidang Holtikultura;
- 6. Bidang Perkebunan
- 7. Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- 8. Bidang Penyuluhan
- 9. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan prasarana pertanian;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis penggunaan sarana pertanian;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pembinaan produksi di bidang pertanian;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- i. kebijakan teknis mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pertanian;
- k. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;

- 1. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- m. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT;
- n. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretaris

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat ;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas;
- i. mengoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) lingkup dinas; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dar kewenangannya.

3. Bidang Prasarana Dan Sarana

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina,
 mengatur dan mengendalikan pengembangan potensi dan
 pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyediaan, penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembiayaan pertanian;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. memantau dan mengevaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

4. Bidang Tanaman Pangan

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang tanaman pangan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina,
 mengatur dan mengendalikan rencana kebutuhan dan
 penyediaan benih dibidang tanaman pangan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina,
 mengatur, mengendalikan dan mengawasi mutu dan
 peredaran benih di bidang tanaman pangan;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina,
 mengatur dan mengendalikan penerapan peningkatan
 produksi bidang tanaman pangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- h. memantau dan mengevaluasi bidang tanaman pangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Hortikultura

- a. menyiapkan bahan menyusun kebijakan perbenihan,
 produksi, perlindungan,pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kebutuhan dan penyediaan benih dibidang hortikultura;
- menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan dan menanggulangi hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- h. memantau dan valuasi di bidang hortikultura; dan
- i. melaksakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Bidang Perkebunan

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan di bidang perbenihan, produksi,perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan dan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;

- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan dan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. memantau dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Bidang Peternakan Kesehatan Hewan

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan sumber daya genetik hewan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan membimbing penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi obat hewan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengelola pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, menerapkan dan mengawasi persyaratan

- teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- memantau dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

8. Bidang Penyuluhan Pertanian

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis penyuluhan pertanian;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian.
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kelembagaan dan ketenagaan.
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan meningkatkan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;

g. memantau dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

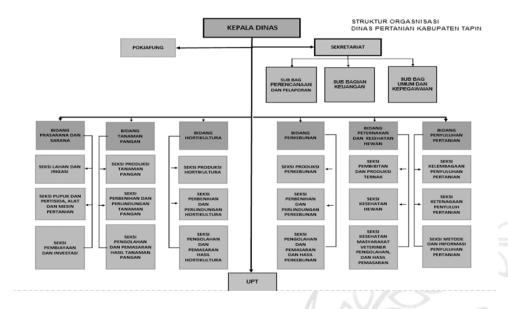
9. Unit Pelaksana Teknis

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas perikanan diatur kemudian bersama-sama pembentukannya dengan Peraturan Bupati

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Gambar berikut :



2.1.2 Sumber Daya Dinas Pertanian

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian kabupaten Tapin

Jumlah pegawai negeri sipil yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Tapin hingga tahun 2023 berjumlah 52 orang yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 29 orang selebihnya adalah pegawai fungsional di kecamatan, sebagaimana tabel berikut ;

Tabel 2.2 Keragaan ASN Dinas Pertanian Tahun 2025

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN	
	drh. M. TRIASMORO	Dombino (IV/o)	Vanala Dinas	
1	196708252006041002	Pembina (IV/a)	Kepala Dinas	
2	H.HERMAN CAHYONO,S.HUT	Pembina TK.I (IV/b)	Sekretaris	
	196702101997031003	` ' '		
3	Hj. ANISAH , SP, M.Si	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang	
	196806061997032005	Temoma (TV) a)	Penyuluhan	
4	M. RIFKI HIDAYATULLAH , SP	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Tanaman Pangan	
	197304211997031006			
5	IKYANI , S.Pt	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perkebunan	
	197305061999031003			
6	NOORHAILI, S.Pt, M.MA	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Hortikultura	
•	197507072007012021			
7	MUHAMMAD ERWIN , S.Pt	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	198406252011011010			
8	LATIFAH KAFIE , SE	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan	
	198402252010012020			
9	SYAMSIAR, SP	Penata Tingkat I (III/d)	Jf. Analis Pasar Hasil Pertanian	
	197202151991112001			
10	SUTIASTINI, SP	Penata Tingkat I (III/d)	Jf. Analis Pasar Hasil Pertanian	
	196803042007012018		1000	
11	ADE SUPIYANDI , S.PKP	Penata Tingkat I (III/d)	Jf. Teknik Pengairan	
11	196711051992031008	_	0	
10	RURI RABIATI , SP	Denote Timelet I (III / 4)	Jf. Pengawas Mutu	
12	198102202009042001	Penata Tingkat I (III/d)	Hasil Pertanian	
12	RAJAB SALASIAH , S.Pt	Ponoto Tinglest I (III /d)	If Apolic Vehicles	
13	197508121996032001	Penata Tingkat I (III/d)	Jf. Analis Kebijakan	
14	MUHAMMAD AKHYAD , S.Pt	Penata Tingkat I (III/d)	JF. Sumber daya Manusia	

FAKHRINA YULIA, SP 197507172007012021 Penata Tingkat I (III/d) Jf. Analis Kebijakan Penata Tingkat I (III/d) Penata Muda Tingkat I (III/d) Penata Kasubaguman Pertanian Penata Muda Tingkat I (III/b) Penata Kasubaguman Pertanian Penata Muda Tingkat I (III/d) Penata Kasubaguman Pertanian Penata Muda Tingkat I (III/d) Penata Kasubaguman Pertanian Penata Muda Tingkat I (III/d) Penata Kasubaguman Penata Muda Tingkat I (III/d) Penat		197003291994031003			
197507172007012021		FAKHRINA YULIA, SP			
16	15	197507172007012021	Penata Tingkat I (III/d)	Jf. Analis Kebijakan	
196910262006041008		GUMONO, S.Pt			
197503312010011009	16	196910262006041008	Penata Tingkat I (III/d)		
197503312010011009 Pelaporan		HAIRY HADI ,SP			
RININTA KESUMA ALAM SP Penata Tingkat I (III/d) Jf. Pengawas Benih Tanaman		197503312010011009	Penata Tingkat I (III/d)		
198209272010012023	18		Penata Tingkat I (III/d)	Jf. Pengawas Benih	
197601282010011011 Penata Tingkat I (III/d) & Hortikultura & Jf. Analis Kebijakan & Hortikultura	-	198209272010012023	- ' '	Tanaman	
197601282010011011 KASIDAH , SP 197912272010012014 Penata Tingkat I (III/d) Jf. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan 198203172010012021 NOVI HANDAYANI HARTANTI , SP 197611082007012017 Penata (III/c) Kasubbag Umum dan Kepegawaian 19701012007012043 Jf. Analis Hasil Pasar Pertanian Jf. Analis Hasil Pasar Pertanian Jf. Analis Hasil Pasar Pertanian Jf. Analis Program dan Pembangunan Pertanian Jf. Analis Program dan Pembangunan Pertanian Jf. Analis Program dan Pembangunan Pertanian Jf. Penata Komputer Pelaksana Lanjutan Penata Muda Tingkat I (III/b) Jf. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Jf. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Jf. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Penata Muda Tingkat I (III/b) Jf. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Penata Muda Tingkat I (III/b) Penat	19	AGENG PAMUNGKAS, SP	Penata Tinokat I (III/d)		
Penata Tingkat I (III/d) Jr. Analis Keuangan		197601282010011011	Tenata Imgkat I (m/ u)	& Hortikultura	
197912272010012014	20	KASIDAH , SP	Penata Tingkat I (III/d)		
198203172010012021 198203172010012021 22	20	197912272010012014	Tomata Imgaat I (III/ U)	dan Risiko Keuangan	
198203172010012021 NOVI HANDAYANI HARTANTI , SP 197611082007012017	21	MARIA RUFAIDA , SP	Penata Tingkat I (III/d)	Jf. Analis Kebijakan	
HARTANTI	41	198203172010012021			
MARDIANA , SP	22	HARTANTI, SP	Penata (III/c)		
MARDIANA SP Penata (III/c) Pertanian		197611082007012017			
197101012007012043 Penata (III/c) Analis Program dan Pembangunan Pertanian	23	MARDIANA, SP	Penata (III/c)		
DAILAMI,SST		197101012007012043			
RIZKI MIRADIANTI , A.Md 198803132010012011 Penata Muda Tingkat I (III/b) Jf. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	24	DAILAMI,SST	Penata (III/c)	Pembangunan	
Penata Muda Tingkat I (III/b) Pelaksana Lanjutan	24	197903172010011005			
198803132010012011		RIZKI MIRADIANTI , A.Md	Donoto Mardo Tinalest I (III /h)		
Penata Muda Tingkat I (III/b) Pelaksana Lanjutan		198803132010012011	- Penata Muda Tingkat I (III/b)		
198709142011012012 Penata Muda Tingkat I (III/b) Pelaksana Lanjutan		MARIANA SIANIPAR, A.Md	D M 1- /T:1 1 /III /1-)	Jf. Pranata Komputer	
Penata Muda Tingkat I (III/b) Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	26	198709142011012012	- Penata Muda Tingkat I (III/b)		
197508031996032003 Masyarakat Veteriner	27	MASRITA	Donoto Mudo Timelest I (III /l-)		
Penata Muda TK,I (III/b) Evaluasi dan Pelaporan	<i>41</i>	197508031996032003	renata muda Tingkat I (III/b)		
198902282019031003 Penata Muda TK,I (III/b) Evaluasi dan Pelaporan	20	M. SYARBANI , S.E.	Depote Marda (TIZ I /III /1-)	Analis Perencanaan,	
Penata Muda TK,I (III/b) Bendahara	2 8	198902282019031003	renata muda 1K,1 (III/b)		
198804122019031005	20	AGUS SUPRIONO , SE	Popoto Mudo TV I (III /h)	Dandahara	
Penata Muda (III/a) Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	4 9	198804122019031005	remata muda 1K,1 (III/D)	Denganara	
199103292020121004 Alat Mesin Pertanian	20	AHMAD RAMDHANI, S.TP	Popoto Mudo (III /c)		
31 RIFANIE , A.Md Penata Muda Tk.I (III/b) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 32 PUSPITA SARI Pengatur Tingkat I (II/d) Pengadministrasi Umum 199004122010012001 Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pramu Kebersihan	3U 	199103292020121004	renata muda (III/a)		
PUSPITA SARI Pengatur Tingkat I (II/d) Pengadministrasi Umum	31	RIFANIE , A.Md	Penata Muda Tk.I (III/b)		
Pengatur Tingkat I (II/d) 199004122010012001 HARNADI Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pramu Kebersihan		197602272010011003	(1-()/<	iscociiataii Hewali	
199004122010012001 HARNADI Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pramu Kebersihan	32	PUSPITA SARI	Pengatur Tingkat I (II/d)		
Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pramu Kebersihan		199004122010012001		Umum	
197705102007011019	33	HARNADI	Pengatur Muda Tk I (II/h)	Pramu Kebersihan	
		197705102007011019	- 5115acai maaa m. (11/0)	Tama Reservitari	

	ZAINUDIN		
34	197108212007011026	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Petugas Keamanan
	KARJANI , SP.MM		
35	196503101988031021	Pembina Utama Muda (IV/c)	Jf. Penyuluh Madya
	H. MUHAMMAD ANSYARI,		
36	SP, M.MA	Pembina Utama Muda (IV/c)	Jf. Penyuluh Madya
	196702091988031008		
37	KARTINI, S.Pt	Pembina Tingkat I (IV/b)	Jf. Penyuluh Madya
38	196807221988032003	J (, , ,	, ,
38	H. TRIYANTO, SP	Pembina Tingkat I (IV/b)	Jf. Penyuluh Madya
	196412251988031009	Temoma imgrati (iv) b)	or, reny drain madya
39	MUSTAFA, S.Pt	Pembina Tingkat I (IV/b)	Jf. Penyuluh Madya
	196412311987031154	1 cmoma migrat i (iv/0)	or, i ciryaran waaya
40	HJ. ERMINA JAINAH, S.PKP	D1	If D
40	196910101989032006	Pembina Tingkat I (IV/b)	Jf. Penyuluh Madya
	DINAH, SP.,M.MA		
41	196411151987102001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Jf. Penyuluh Madya
	MASLAN, SP		
42	196709021988031008	Pembina TK. I (IV/b)	Jf. Penyuluh Madya
43	ABDUL RASYID NAZAR, SP		
	196803071989031008	Pembina Tk.I (IV/b)	Jf. Penyuluh Madya
44	ENDANG BUDI		Jf. Penyuluh Madya
	SUSILOWATI, SP 196505111988032012	Pembina Tk.I (IV/b)	
	H. TATA SUYANA, SP		
	197001101989031004	Pembina (IV/a)	Jf. Penyuluh Madya
	SUGINA, SST		
46	196401031993031009	Pembina (IV/a)	Jf. Penyuluh Madya
	HALIDAH, S.PKP		
47	196504031987102002	Pembina (IV/a)	Jf. Penyuluh Madya
	SALASIAH, S.PKP		
48	196405031988032014	Pembina (IV/a)	Jf. Penyuluh Madya
	RENNY AKHIRIYANI, SP		
49	197611222000032002	Pembina (IV/a)	Jf. Penyuluh Madya
	HJ. ARBAINAH, S.PKP		10000
50	196406161988032011	Pembina (IV/a)	Jf. Penyuluh Madya
		Pembina (IV/a)	Jf. Penyuluh Madya
51	JUNAIDI, S.Pt	I emoma (IV/a)	or. renyurun mauya
	197008241993031006	Dombino (IV/o)	If Donynghub Madae
52	M. AMHOR FADLY, S.Pt	Pembina (IV/a)	Jf. Penyuluh Madya
	197712022006041015	Danataina (IVI /a)	If Developed M. 1
53	HJ. BARLIAN, SP	Pembina (IV/a)	Jf. Penyuluh Madya
	196511171987112001		

	HJ. ANI RAHMAWATI,	Pembina (IV/a)	Jf. Penyuluh Madya
54	S.Pt., MMA	Pembina (IV/a)	Ji. Penyulun mauya
	197405122006042007		
55	MINARNI, S.Pt	Pembina (IV/a)	Jf. Penyuluh Madya
	197505102006042011		
56 57	SUPINANTI, S.PKP	Pembina (IV/a)	Jf. Penyuluh Madya
	197010102000032008	, , ,	, , ,
57	HAMDAN ARIFIN, S.Pt	Pembina (IV/a)	Jf. Penyuluh Madya
	197607162006041007	, , ,	, , ,
58	TRI RAHAYU NINGSIH, A.Md	Penata Tingkat I (III/d)	Jf. Penyuluh Penyelia
30	196812151993032012		
=0	M. AMINUDIN, S.Pt	Penata Tingkat I (III/d)	Jf. Penyuluh Muda
59	198107012006041010		
	SAPTO NURMIYATI, SP	Penata Tingkat I (III/d)	Jf. Penyuluh Muda
60	197710152006042006		
	SLAMET, A.Md	D (70' 1) T (77' / 1)	10 D 11 D "
62	196601011987091002	Penata Tingkat I (III/d)	Jf. Penyuluh Penyelia
	HJ. NOOR AINA, S.PKP	Penata Tingkat I (III/d)	Jf. Penyuluh Muda
	197104061998032006		
63	RAHMA MAULIDA ARSYAD, SP	Penata Tingkat I (III/d)	Jf. Penyuluh Muda
	198511192010012019		
64	JARKAMALUDIN, SP	Penata Tingkat I (III/d)	Jf. Penyuluh Muda
	196812061993031008		
	RAHMAT EDI FITRY, SP	Penata (III/c)	Jf. Penyuluh Muda
65	197908232010011021	, , ,	
	MAYA ERVINA NASA INDA, SP	Penata (III/c)	Jf. Penyuluh Muda
66	198105302006042017		
	VIVI HERYANTI, SP	Penata (III/c)	Jf. Penyuluh Muda
67	197609042011012003	X 1 -1	J 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
	ANANG AS'ARI, SP		Penyuluh Pertanian
68	198211052015031001	Penata Muda (III/a)	Pertama
	RATIH NOVIARTIE, SP		Penyuluh Pertanian
69	199204272015032004	Penata Muda (III/a)	Pertama
	WAHIDAH	Penata	100000
70	196902012000032004	(III/c)	Jf. Penyuluh Penyelia
	ADIANI, A.Md	/ ()	Jf. Penyuluh Pelaksana
71	196801211994031013	Penata Muda (III/a)	Lanjutan
	NURSITI SURIASIH, SP	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Pertanian
72	199005132020122007		Pertama
		Penata Muda (III/a)	Penyuluh Pertanian

	199307262020122014			
	FATHUR RAHMAN, SP	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Pertanian	
74 75	199307102020121009		Pertama	
75	MUJAHIDILLAH, SP	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Pertanian Pertama	
75	199001132020121004		Tertama	
7.6	SITI HAPIZAH, SP	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Pertanian Pertama	
76	199408122020122009		2020000	
77	LUKMAN PURBA WAHYUDI, SP	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Pertanian Pertama	
78 79	198506082020121003			
78	FAJAR YULYANTO, SP	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Pertanian Pertama	
	19950728 202202 1 002			
79	NOR AQIDAH, S.Tr.Pt	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Pertanian Pertama	
	19970129 202202 2 001			
80	USA REINALDO, SST	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Pertanian Pertama	
	19950325 202202 1 001			
81	RINI NUR RAHMAH, SP	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Pertanian Pertama	
81 -	19930505 202202 2 002			
	CANDRA ARIYANTI, SP	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Pertanian	
	19940816 202202 2 001	i ciiata wuda (III/a)	Pertama	
82 -	JUNAIDI	- Penata Muda (III/a)	Pengolah Data	
	19691107200701 1 030	Torrata widda (III/ a)	i ciigoiaii Data	
83 -	M. TAUPAN HERIYANTO, A.Md	Pongotur (II / o)	Penyuluh Pertanian	
	199501012020121012	Pengatur (II/c)	Terampil	
	AHLUNNAZAR, A.Md	Demography (III / -)	Penyuluh Pertanian	
85	199505072020121004	Pengatur (II/c)	Terampil	
86	ARTU ARU, A.Md	Pengatur (II/c)	Penyuluh Pertanian	
00	199703082020121005	r crigatur (II/C)	Terampil	
87	SUNARDI	Pengatur Muda TK. I (II/b)	Jf. Penyuluh Pelaksana	
	198111102017061003			
88	EKO MARYANTO	Pengatur Muda TK. I (II/b)	Jf. Penyuluh Pelaksana	
	198203232017061001		10000	
89	MUHAMMAD AMIN KUTBI	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Jf. Penyuluh Pelaksana	
	198506302017061001			
90	METRI TEGUH HADIYANTO	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Jf. Penyuluh Pelaksana	
	198505182017061001		700000	
91	EKO EDI SYAHPUTRA	Pengatur Muda (II/a)	Jf. Penyuluh Pelaksana	
	198203312017061001		()/9	
92	MASDAH HERLINA PUTRI	Pengatur Muda (II/a)	Jf. Penyuluh Pelaksana	

199610012020122012	

Tabel 2.3 Data Jabatan Struktural PNS Dinas Pertanian Tahun 2025

NO	JABATAN STRUKTURAL	JENJANG JABATAN ESELONERING PERTANIAN DAN NON ESELONERING	JUMLAH
1	Kepala Dinas	II.b	1
2	Sekretaris Dinas	III.a	1
3	Kepala Bidang	III.b	6
4	Kepala Sub Bagian	IV.a	3
5	JF.	IV.a	15
6	Pelaksana / Pengadministrasi Umum	Fungsional Umum / Pelaksana	12
7	Kepala UPT	IV.d	1
	JUMLAH		38

Tabel 2.4 Data Jabatan Fungsional PNS Dinas Pertanian Tahun 2025

NO	LOKASI PENEMPATAN TUGAS DESA, KECAMATAN DAN KABUPATEN	JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PRANATA KOMPUTER AHLI DAN TERAMPIL
1	BINUANG	5
2	SALAM BABARIS	3
3	HATUNGUN	2
4	TAPIN SELATAN	4
5	BUNGUR	7
6	PIANI	3
7	LOKPAIKAT	6
8	TAPIN UTARA	6
9	BAKARANGAN	6
10	TAPIN TENGAH	4
11	CANDI LARAS SELATAN	6
12	CANDI LARAS UTARA	6
13	BASE CAMP KABUPATEN / KJF Kabupaten	4
_	Jumlah Jabatan Fungsional Penyuluh se Kabupaten	62
14	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Lokasi	200000
	JUMLAH TENAGA FUNGSIONAL KABUPATEN	64

2.1.2.2 Sarana Prasarana

Berikut ini adalah daftar aset yang dimiliki dan digunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya:

Tabel 2.5 Rekapitulasi laporan Aset Tetap Menurut Intrakomptabel
Dinas Pertanian Akhir Tahun 2024

Kode Lokasi : 23.00.00 - Dinas Pertanian

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kabupaten/Kota : KABUPATEN TAPIN

			Penggolongan dan Kodefikasi Barang	t	0-14- 414-
Kod	Kode Barang Nama Barang		Jumlah	Saldo Akhir	
	1 2		3	4	
1	3		ASET TETAP	2.813	98.874.052.113,68
1	3	1	TANAH	34	11.520.841.940,00
1	3	2	PERALATAN DAN MESIN	2.447	18.338.180.455,27
1	3	3	GEDUNG DAN BANGUNAN	237	58.414.276.187,41
1	3	4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	47	10.011.328.531,00
1	3	5	ASET TETAP LAIN	48	589.425.000,00

2.1.2.3 Anggaran 5 Tahun Terakhir

Berikut ini adalah daftar Jumlah anggaran sesuai Program selama 5 tahun :

N o	Program	Anggaran Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.157.647.3 14	23.808.568.9 66	17.977.457.6 81	22.286.031.7 65	23.295.019.7

N o	Program		,	Anggaran Tahu	ın	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.514.173.20 0	8.102.438.34 5	17.334.490.6 95	53.085.538.0 44	6.705.954.68 7
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.955.170.2 00	10.265.992.9 50	15.853.773.6 76	22.266.621.4 43	26.437.741.2 60
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	244.047.070	402.112.200	1.047.441.93	2.343.038.86 5	787.270.000
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	561.723.100	823.425.000	761.487.205	3.449.079.65 9	2.632.827.87 2
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	51.690.000	79.790.000	118.152.640	103.126.800	210.550.000
7	Program Penyuluhan Pertanian	2.536.201.90 0	3.751.947.90 0	1.584.429.64 8	5.236.658.47 8	1.134.778.81 0
Jumlah		36.020.652.7 84	47.234.275.3 61	54.677.233.4 78	108.770.095. 054	61.204.142.3 99

2.1.2.4 Standar Operasional dan Prosedur

Berikut ini Standar Operasional atau SOP yang terdapat pada Dinas Pertanian :

- 1. SOP Penyusunan Resntra
- 2. SOP Money Renstra
- 3. SOP Penyusunan Renja
- 4. SOP Pengumpulan Data Kinerja
- 5. SOP Mekanisme Pengukuran Kinerja
- 6. SOP Penyusunan LKIP
- 7. SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

2.1.2.5 Inovasi

Adapun inovasi yang terdapat pada Dinas Pertanian adalah

:

- 1. Pekasai Pupur (Pembuatan Kayuapu Sebagai Pupuk Organik)
- Tiga Asmara (Tindakan Gerakan Cepat Anggota Inseminator/Medik/Paramedik melayani peternak dan masyarakat)

2.1.3 Kinerja Pelayanan

Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapin menggunakan Indikator Kinerja Mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, pada periode Rencana Strategis sebelumnya SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapin telah mencapai tingkat kinerja yang cukup baik, yang tergambar pada tabel 2.1.3 . dibawah.

Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapin tahun 2024 tergambar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan tahunan Dinas Pertanian yang cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari capaian target Komoditas Pertanian yang meningkat berturut-turut sejak 2019 – 2024 Sebagai Berikut:

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Layanan Dinas Pertanian

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan komoditas pertanian	LPE subkategori pertanian peternakan perburuan dan jasa pertanian (Persen)	2,70	-3,68	-7,65	-3,60	2,71
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan produksi padi (%)	6,70	-4,93	4,22	-55,26	4,50
		Persentase Peningkatan Produksi Cabe Rawit Hiyung (%)	-24,18	15,24	30,38	6,79	3,35
		Persentase Peningkatan Produksi Jahe (%)	00	434,64	71,58	2,41	4,39
		Persentase Peningkatan Produksi Jeruk (%)	23,41	7,17	6,74	2,14	-17,78
		Persentase Peningkatan Produksi Karet (%)	8,58	-6,19	4,33	4,08	1,82
		Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit (%)	80,65	18,92	1,81	8,25	31,99

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Peningkatan Produksi Daging (%)	6,28	38,95	26,33	7,47	31,52
		Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)	3,02	17,92	24,57	8,40	24,10
3	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian	Persentase peningkatan kelompoktani yg meningkatkan nilai tambah produk pertanian (Persen)	-	-	-	13,98	13,99
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Skor)	82,19	70,6	76,80	80,00	76,40
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Skor)	-	-	38,00	40,00	78,06

Secara umum, Dinas Pertanian Kabupaten Tapin telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Rincian kinerja yang menjadi sasaran strategis tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan komoditas pertanian
- 2. Meningkatnya Produksi Pertanian
- 3. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian
- 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 5. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Selama periode 2020–2024, kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapin menunjukkan dinamika yang kompleks dalam upaya mencapai target pembangunan pertanian. Evaluasi terhadap indikator sasaran menunjukkan adanya fluktuasi capaian, yang mencerminkan tantangan eksternal maupun internal dalam tata kelola sektor pertanian daerah. Adapun analisis sesuai sasaran strategis sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Komoditas Pertanian

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian mengalami kontraksi yang cukup dalam sejak tahun 2021 hingga 2023. Setelah tumbuh positif 2,70% pada 2020, LPE anjlok menjadi -3,68% di 2021 dan semakin turun ke -7,65% pada 2022. Tahun 2023 masih menunjukkan kontraksi (-3,60%) sebelum akhirnya pulih menjadi positif kembali pada 2024 (2,71%).

Penurunan ini erat kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19, gangguan iklim, lemahnya diversifikasi komoditas, dan ketergantungan pada sistem pertanian tradisional. Pemulihan 2024 menjadi indikasi adanya respons kebijakan yang mulai efektif, namun belum merata di seluruh komoditas.

2. Meningkatnya Produksi Pertanian

Capaian produksi berbagai komoditas pertanian menunjukkan variasi yang sangat besar antar tahun dan antar komoditas. Produksi padi mengalami penurunan tajam pada 2023 (-55,26%) setelah sempat naik di 2022 (4,22%), dan kembali membaik pada 2024 (4,50%).

Komoditas cabe rawit Hiyung, sebagai komoditas khas daerah,

menunjukkan perbaikan dengan tren positif berturut-turut sejak 2021, meskipun melambat di 2023 dan 2024. Jahe mengalami lonjakan luar biasa pada 2021 (434,64%) namun menurun drastis di tahun-tahun berikutnya. Produksi jeruk menurun secara bertahap hingga akhirnya anjlok di 2024 (-17,78%). Komoditas karet cukup stabil, meski tren pertumbuhannya melambat. Di sisi lain, kelapa sawit, daging, dan telur menunjukkan konsistensi positif dengan pertumbuhan yang relatif stabil. Terutama kelapa sawit dan telur, yang mengalami pertumbuhan signifikan pada 2024.

Fluktuasi besar pada beberapa komoditas menunjukkan adanya ketergantungan terhadap faktor cuaca, kurangnya irigasi yang andal, lemahnya sistem pendampingan dan pemanfaatan teknologi budidaya. Namun, komoditas seperti kelapa sawit, telur, dan daging dapat menjadi andalan strategis daerah karena stabilitas produksinya dan daya serap pasarnya yang tinggi. Perlu penguatan pada sisi input produksi, riset varietas lokal, dan manajemen pascapanen untuk meningkatkan ketahanan komoditas lain.

3. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian

Indikator nilai tambah kelompok tani yang meningkatkan produk pertanian baru tercatat pada 2023 (13,98%) dan sedikit meningkat pada 2024 (13,99%).

Capaian ini menunjukkan bahwa pengembangan nilai tambah produk pertanian di tingkat kelompok tani masih berada pada level dasar. Nilai capaian yang relatif rendah mencerminkan keterbatasan akses terhadap teknologi pengolahan, minimnya pelatihan kewirausahaan, serta belum kuatnya kemitraan dengan pelaku industri hilir. Meski terdapat sedikit peningkatan di 2024, perubahannya sangat marginal, menandakan perlunya dorongan strategis yang lebih kuat dari sisi pendampingan usaha tani, permodalan, serta fasilitasi akses pasar dan alat pascapanen.

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Dinas Pertanian menunjukkan fluktuasi, dari skor 82,19 (2020) menurun ke 70,6 (2021), kemudian membaik kembali pada 2022–2023, namun sedikit turun lagi di 2024 (76,40).

Penurunan awal menandakan tantangan dalam manajemen

kinerja, integrasi sistem pelaporan, dan konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan. Perbaikan di tahun-tahun selanjutnya menunjukkan peningkatan pemahaman akan mekanisme SAKIP, namun dibutuhkan penguatan berbasis sistem digital dan penguatan SDM pengelola kinerja.

5. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Indeks Profesionalisme ASN meningkat signifikan dari skor awal 38,00 (2022) menjadi 78,06 (2024).

Lompatan besar dalam dua tahun terakhir menunjukkan keberhasilan pembinaan aparatur, pelatihan, dan penerapan sistem merit. Capaian ini harus dijaga dengan sistem reward dan punishment, serta pembinaan berkelanjutan berbasis kinerja dan inovasi pelayanan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dari Dinas Pertanian Kabupaten Tapin adalah Masyarakat di Kabupaten Tapin terutama para petani.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian layanan

Mitra Dinas Pertanian Kabupaten Tapin dalam memberikan layanan kepada masyarakat di Kabupaten Tapin ada beberapa , diantaranya

- Media Massa, Media massa (cetak dan online) dapat menjadi mitra SKPD dalam menyebarkan informasi terkait program dan kegiatan pemerintah daerah, serta memberikan edukasi kepada masyarakat., termasuk juga media TV seperti Tapin TV
- 2. Lembaga Pendidikan, Lembaga pendidikan, Perguruan tinggi, dilibatkan dalam pelatihan, penyuluhan kepada masyarakat, atau penelitian terkait pelayanan publik.
- 3. Organisasi Masyarakat, Organisasi masyarakat, seperti lembaga kelompok tani, dapat menjadi mitra dalam pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan program-program tertentu, atau pengawasan pelayanan publik.
- 4. Dunia Usaha, seperti perusahaan atau pelaku UMKM, dapat membantu dalam penyediaan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, atau program CSR (Corporate Social Responsibility) yang bermanfaat bagi masyarakat.

5. Perangkat Daerah Lainnya, Kemitraan juga dapat terjadi antar perangkat daerah itu sendiri, dengan dinas pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat dalam pengelolaan irigasi, dengan PTSP dalam aspek perizinan usaha pertanian, dengan Perdagangan dalam aspek promosi dan Pemasaran serta dengan Perindustrian dalam aspek pengembangan sektor hilir pertanian

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.

Dukungan BUMD di Kabaupaten Tapin yang dapat memberikan dukungan kepada capaian kinerja SKPD adalah seperti Bank Tapin, Bank Tapin meiliki program kredit, Seperti program kredit untuk PNS/Aparat Desa,BUMDes, kredit untuk modal usaha (UMKM), kredit petani, kredit karyawan perkebunan sawit dan Pertambangan, dan kredit untuk proyek.

2.1.7 Kerjasama yang menjadi Tanggung Jawab Daerah.

Kerjasama yang menjadi Tanggung Jawab Daerah terkait Dinas Pertanian selama ini tidak terjadi secara terus menerus , namun pada kondisi tertentu seperti penanggulangan bendana kebakaran dan banjir di perbatasan wilayah antar kabupaten.

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selalu memiliki dinamika permasalahan dan isu yang selalu mengiringi. Permasalahan merupakan gap antara rencana dan realisasi, permasalahan dapat diartikan belum tercapainya tujuan dari daerah. Dalam perencanaan pembangunan merumuskan permasalahan perlu adanya identifikasi dan analisis dari evaluasi pencapaian-pencapaian pembangunan sebelumnya, gambaran apa yang menjadi sumber/akar masalah dan bagian mana yang harus diperbaiki. Perumusan permasalahan pembangunan merupakan bagian penting dalam perencanaan. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang tepat, diharapkan akan mampu memberikan arah pijakan dalam perencanaan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Sehingga kebijakan daerah sebagai tindak lanjut, diharapkan mampu mengatasi

permasalahan secara efektif dan efisien. Selain permasalahan, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya antisipasi isu strategis baik berupa ancaman maupun peluang yang berdampak besar dalam pembangunan daerah.

Memahami dinamika permasalahan dan gejolak pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Tapin, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu global, Nasional, dan daerah serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

2.2.1 Permasalahan pelayanan perangkat daerah

Strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah tindakan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dijabarkan kedalam kebijakan dan program, selanjutnya program akan dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan yang disajikan didalam Rancangan Rencana Kerja (RENJA) semua dilaksanakan dalam upaya menjawab permasalahan yang terdapat di Kabupaten Tapin pada sektor pertanian :

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Tapin pada sektor pertanian secara umum diantaranya :

- 1. Masih belum optimalnya peningkatan pertumbuhan pertanian khususnya komoditas unggulan dan strategis, lemahnya diversifikasi komoditas, dan ketergantungan pada sistem pertanian tradisional, juga lemahnya SDM Petani dan manajeman kelompoktani
 - a. Sebagian besar komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Tapin masih didominasi oleh varietas lokal dengan produktivitas dan kualitas yang belum optimal.
 - b. Minimnya pemanfaatan teknologi pertanian modern dan terbatasnya akses petani terhadap benih unggul, pupuk

- berkualitas, dan pelatihan teknis menyebabkan pertumbuhan komoditas kurang maksimal.
- c. Adaptasi terhadap perubahan iklim masih rendah, sehingga produksi mudah terganggu oleh cuaca ekstrem, banjir, atau kekeringan yang kerap terjadi di beberapa kecamatan seperti Binuang, Hatungun, dan Salam Babaris.
- d. Koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan komoditas belum optimal, sehingga pengembangan kawasan sentra pertanian belum terintegrasi dengan baik.
- 2. Masih belum optimalnya upaya peningkatan Produksi dan produksi pertanian serta Pertanian yang Berkelanjutan disebabkan belum optimalnya keberadaan sarana dan prasana yang memadai
 - a. Luas lahan pertanian yang tersedia di Tapin belum dimanfaatkan secara optimal, banyak sawah tadah hujan belum memiliki infrastruktur irigasi memadai.
 - b. Produktivitas pertanian di beberapa wilayah, , masih di bawah potensi akibat keterbatasan sarana produksi, modal usaha tani, serta regenerasi petani yang rendah.
 - c. Serangan hama dan penyakit tanaman yang terus berulang, sementara pengendalian terpadu masih belum maksimal karena keterbatasan tenaga penyuluh dan fasilitas pendukung.
 - d. Minimnya praktik pertanian ramah lingkungan menyebabkan degradasi tanah dan sumber daya air di lahan pertanian, terutama di wilayah yang dekat dengan aktivitas tambang.
- 3. Belum kuatnya sektor hilir dan serta upaya Peningkatan Nilai Tambah Produk pertanian sehingga upaya peningkatan nilai tambah juga belum terjadi secara optimal
 - a. Hasil pertanian di Kabupaten Tapin sebagian besar dijual dalam bentuk mentah, dengan sedikit proses pengolahan pascapanen yang menyebabkan nilai jual rendah.
 - b. Akses petani terhadap teknologi pengolahan dan industri kecil menengah (IKM) di sektor pertanian masih sangat terbatas, terutama di desa-desa terpencil.
 - c. Rantai pemasaran produk pertanian belum efisien, sehingga margin keuntungan lebih banyak dinikmati oleh tengkulak atau pedagang perantara dibandingkan petani.

d. Kurangnya branding dan promosi komoditas unggulan Tapin (seperti padi, karet, dan hortikultura) menyebabkan lemahnya daya saing di pasar regional maupun nasional.

Selain hal ditas yang terkait Perangkat Daerah adalah masih didapati juga permasalahan pada aspek internal seperti kemampuan manajerial khususnya pada Akuntabilitas kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, Isu Strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang.

2.2.3 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

- Dalam upaya pengembangan sektor pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masyarakat tani kita masih sangat tergantung pada berbagai bentuk bantuan dari program pemerintah dalam pengembangannya, sehingga upaya bantuan yang dimaksudkan untuk memunculkan kemandirian dan keberlanjutan yang berorientasi pada agrobisnis tentu tidak mudah terealisir.
- 2. Meningkatnya kebutuhan akan hasil produksi pangan, hortikultura, ternak dan hasil perkebunan menuntut SKPD bekerja maksimal dan dengan memanfaatkan kondisi dan kemampuan yang ada baik SDM maupun wilayah sehingga mampu berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan baik lokal maupun regional secara cukup dan berkesinambungan
- 3. Sumber daya manusia dan kelembagaan petani/kelompok tani yang masih rendah usaha tani secara profesional sehingga orientasi petani dan kelompoktani dalam pembangunan pertanian selaku pelaku utama belum maksimal
- 4. Perlunya membangun komitmen dan dukungan masyarakat pertanian Kabupaten Tapin untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Tapin sebagai salah satu lumbung pangan, ternak dan sentra perkebunan utama.

2.2.4 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

Sedangkan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten tapin adalah sebagai berikut :

- 1. Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem yang melimpah baik sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunana maupun peternakan
- 2. Lahan Pertanian dengan tipologi yang beragam terdapat di wilayah Kabupaten Tapin
- 3. Sumber daya lokal yang bisa dikembangkan cukup banyak
- 4. Jumlah penduduk dengan usia kerja yang cukup banyak
- 5. Tersedianya aparat struktural dan fungsional aparat penyuluh yang mencukupi
- 6. Tersedianya sarana UPT Tanaman Pangan, Hortikultura, , Rumah Potong Hewan dan sarana penunjang lainnya
- 7. Tersedianya 12 (duabelas) BP Penuluhan di 12 Kecamatan sebagai wadah/tempat pelatihan bagi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan berusaha tani.

2.2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pertanian

Faktor-faktor yang permasalahan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Tapin baik secara internal (dalam kewenangan Dinas Pertanian) maupun yang external (diluar kewenangan Dinas Pertanian) adalah sebagai berikut :

Analisis lingkungan internal dari berbagai aspek yang mempunyai pengaruh pada pelayanan Dinas Pertanian terdiri dari kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) yang mencakup masalah sumber daya (SDM, dana,prasarana/sarana),efesiensi, efektivitas, produktivitas, struktur organisasi, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Hasil identifikasi analisis lingkungan internal adalah sebagai berikut:

- 1. Kekuatan (Strenght):
 - a. Disiplin pegawai yang baik.
 - b. Sarana transportasi dan komunikasi yang cukup.
 - c. Memiliki pedoman yang jelas
- 2. Kelemahan (Weakness)
 - a. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia masih belum optimal.

b. produksi dan mutu produk pertanian masih belum mencapai sebagaimana

sasaran nasional

c. Kelembagaan petani secara umum masih belum mantap.

Analisis lingkungan eksternal dilakukan terhadap berbagai aspek di luar Kewenangan Dinas Pertanian yang berpengaruh terhadap pelayanan SKPD. Faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang (Opportunity) dan tantangan (Threat) berkisar pada masalah perkembangan sosial budaya, politik, ekonomi, keamanan, tehnologi dan lain-lain. Hasil identifikasi analisis lingkungan eksternal adalah sebagai berikut:

- 1. Peluang (Opportunities):
 - a. Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK Bidang Pertanian), APBN

Dekonsentrasi, APBN-Tugas Pembantuan, APBD Kabupaten dan

APBD Provinsi.

- b. Keanekaragaman hayati dan agroekosistem melimpah.
- c. Potensi lahan yang bisa dikembangkan masih cukup luas.
- d. Paket teknologi tepat guna cukup tersedia.
- e. Kesempatan pendidikan dan latihan masih tersedia.

2. Tantangan (Treaths):

- a. Kebiasaan dan perilaku masyarakat petani dalam pengembangan usaha tani yang masih terbiasa mendapatkan berbagai bentuk bantuan dari program pemerintah, sehingga cukup sulit untuk memotivasi kepada arah produktif dan kemandirian kelompok tani.
- Kebijakan pemerintah terhadap penyediaan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi.
- c. Kerusakan dan alih fungsi lahan pertanian produktif semakin luas.
- d. Kebijakan pemerintah terhadap standarisasi harga dasar pokok, kebijakan ekspedisi impor-ekspor produk pertanian yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai harga jual dipasar nasional dan pasar lokal.
- e. Investasi pemerintah dan swasta di bidang pertanian Berdasarkan Analisis SWOT maka didapatkan sebagai berikut :

Tabel 2.7 Analisis SWOT

	Jenis Strategi	Penjelasan
1	Strategi W–O (Weakness –	- Peningkatan kapasitas SDM melalui
	Opportunity)	pelatihan dan pendidikan.
		- Penguatan kelembagaan petani
		dengan akses teknologi dan bantuan.
		- Perbaikan kualitas produksi untuk
		capai target nasional.
2	Strategi S-O (Strength -	- Percepatan serapan program dan
	Opportunity)	anggaran berbasis kedisiplinan.
		- Pemanfaatan lahan potensial
		dengan teknologi pertanian kawasan.
3	Strategi S–T (Strength – Threat)	- Monitoring dan respons cepat atas
		kebijakan pupuk dan harga.
		- Pengawasan alih fungsi lahan
		pertanian.
4	Strategi W–T (Weakness –	- Pengurangan ketergantungan
	Threat)	bantuan melalui pelatihan
		kewirausahaan.
		- Revitalisasi SDM dan kelembagaan
		untuk hadapi tekanan pasar.

2.2.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Arah perencanaan wilayah Kabupaten Tapin dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2043. Perda tersebut dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan harmonisasi dokumen perencanan pembangunan spasial dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam praktiknya, RTRW memiliki peran penting sebagai dokumen perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian terhadap penataan ruang.

Dalam konteks sinkronisasi antara RTRW dan RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tapin. Adapun tujuan dari penataan ruang Kabupaten Tapin yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tapin, dapat dijabarkan sebagai berikut:

"Mewujudkan penataan ruang Kabupaten Tapin sebagai pusat kegiatan kawasan dan agropolitan yang didukung sektor pertanian, perikanan,

industri, Pertanian jasa, dan pariwisata yang unggul serta berwawasan lingkungan".

Dari kerangka tujuan RTRW di atas, pada dasarnya arahan pengembangan kewilayahan Kabupaten Tapin terfokus ke arah pengembangan sektor agropolitan yang diperkuat dengan sektor pertanian, perikanan, industri, Pertanian dan jasa, serta pariwisata.

Adapun Berdasarkan hasil Kajian KLHS-RPJMD pada tahapan pra validasi, Indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten terdapat 197 yang relevan, ditambah 1 indikator khas kabupaten (penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan) yang terdiri. Dari 96 indikator TPB pilar sosial, 50 indikator TPB pilar ekonomi, 31 indikator pilar lingkungan dan 21 indikator TPB pilar hukum dan tata kelola. Berdasarkan data tahun 2012-2023 diketahui bahwa dari 198 indikator TPB terdapat 100 indikator TPB (50,51%) yang mencapai target, 58 indikator TPB (29,29%) belum mencapai target, dan 40 indikator yang belum ada/tidak tersedia datanya.

Adapun berdasarkan telaahan atas RPJMD Pemerintah Daerah telah disumuskan beberapa permasalahan terkait pembangunan diantaranya Belum optimalnya penguatan sektor unggulan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang inklusif di Kabupaten Tapin mencerminkan tantangan struktural yang kompleks. Salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan ini adalah dominasi sektor pertambangan yang besar. Meskipun memberikan kontribusi ekonomi signifikan, kurang mampu menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan merata. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor ini menyebabkan volatilitas ekonomi, mengingat sifat sektor pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan risiko lingkungan. Di sisi lain, sektor pertanian yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian daerah mengalami pertumbuhan yang melambat, tidak mampu mengikuti dinamika kebutuhan dan perkembangan teknologi. Hal ini mengakibatkan rendahnya diversifikasi ekonomi yang sangat diperlukan untuk stabilitas ekonomi daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapin, kontribusi pertambangan dan penggalian terhadap PDRB selama 3 tahun terakhir sebesar 45,41% pada tahun 2022 yang meningkat 44,50% pada tahun 2023 dan 2024 mengalami kontraksi menjadi 43,12%. Sedangkan kontribusi pertanian, peternakan,

kehutanan, dan perikanan Kabupaten Tapin pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian kontribusi pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2022 sebesar 13,89%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 14,26% serta pada tahun 2024 capaian kontribusi tersebut sebesar 14,46%.

Memahami hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Tapin terhadap sektor pertambangan. Sehingga sektorsektor unggulan daerah non pertambangan masih belum optimal pengembangannya. Melalui permasalahan ini, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu untuk direalisasikan. Kabupaten Tapin perlu mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan peningkatan produktivitas pertanian dengan diversifikasi ekonomi. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengolahan dan pemasaran yang lebih baik. Diversifikasi ekonomi juga harus mencakup pengembangan sektorsektor potensial lainnya seperti pariwisata dan industri kreatif, yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian, penguatan sektor unggulan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tapin.

Sehingga permasalahan ini atas urusan pertanian dalam RPJMD 2025-2029 adalah Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan dan Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam mengelola sektor pertanian.

Dari hal diatas pada RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029 dirumuskan isu strategis daerah terkait pertanian adalah : Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Sektor Pertanian. Transformasi ekonomi berkelanjutan berbasis sektor pertanian diharapkan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Tapin. Salah satu dampak utama adalah peningkatan kesejahteraan petani melalui adopsi praktik pertanian berkelanjutan yang meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Dengan penerapan teknologi pertanian, modern, dan ramah lingkungan, petani dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, seperti air dan tanah, sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik dan lebih berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani

tetapi juga membantu menjaga kestabilan ekosistem lokal dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain ekonomi transformasi berbasis pertanian berkelanjutan dapat mendorong diversifikasi ekonomi di Kabupaten Tapin. Dengan mengembangkan berbagai produk pertanian unggulan dan menciptakan rantai nilai yang lebih panjang, wilayah ini dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Diversifikasi ini dapat mencakup pengolahan hasil pertanian menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan pengembangan sektor pertanian diarahkan pada pengembangan industri hijau. Dengan pengembangan industri hijau, diharapkan pembangunan industri pengolahan produk pertanian, yang akan memberikan nilai tambah produk. Dengan adanya industri hijau ini nantinya akan terbuka peluang baru bagi usaha kecil dan menengah, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan industri terkait. Transformasi ini juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, Pendidikan SDM yang sesuai dengan kesempatan kerja, dan pelatihan bagi petani dan pelaku usaha. Dengan demikian keberlanjutan ekonomi dapat terjamin dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan daerah.

- A. Dengan berdasarkan data yang diperoleh maka hasil identifikasi dan perumusan isu adalah sebagai berikut:
 - a. Tata kelola pemerintah;
 - b. Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan Iklim;
 - d. Alih fungsi lahan
 - e. Pengelolaan sampah
 - f. Pertumbuhan ekonomi/Ekonomi Hijau
- B. Dengan rekomendasi strategi dan arah kebijakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan
 - 2) Peningkatan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar
 - 3) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
 - 4) Peningkatan ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan Iklim
 - 5) Peningkatan kolaborasi dengan stakeholder

- 6) Pengelolaan sampah
- 7) Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau

Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan permasalahan Pertanian di Kabupaten Tapin menjadi landasan utama Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berikut Tabel yang menunjukkan yang membantu membuat kesimpulan Isu strategis berdasarkan data yang tersaji :

Tabel 2.8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN	DENGANDD				
KEWENANGAN PD		DENGAN PD	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
1	2	3	4	5	6	7	
Potensi Ekonomi,	1. Masih belum	1 .Tata kelola	1.Geopolitik	1. Resiliensi Dan	1. Tingginya	1. Masih terbatasnya	
LPE subkategori	optimalnya	pemerintah;	Dan	Prospek	Potensi	kualitas	
pertanian	peningkatan	2 .Alih fungsi	Geoekonomi	Perekonomian	Transformasi	pertumbuhan	
peternakan	pertumbuhan	lahan	2. Dampak	Yang Positif	Ekonomi Hijau	komoditas pertanian	
perburuan dan jasa	pertanian	3. Pertumbuhan	Perubahan	2.	Menuju	unggulan secara	
pertanian (Persen)	khususnya	ekonomi/Ekonomi	Iklim Global	Keanekaragaman	Pertumbuhan	berkelanjutan	
	komoditas unggulan	Hijau	3.	Hayati Dan	Ekonomi	khususnya dalam	
	dan strategis,	4. Peningkatan	Perkembangan	Potensi	Berkualitas	menuju tapin	
	lemahnya		Teknologi	Lingkungan	2. Akselerasi	sebagai kawasan	
	diversifikasi	sumberdaya	4. Industri 5.0	3. Potensi	Penyediaan	agropolitan , hal ini	
	komoditas, dan	manusia	5. Adanya	Sumber Daya	Infrastruktur	juga karena masih	
	ketergantungan	5. Peningkatan	Pergeseran	Manusia Dan	Pembangunan	rendahnya SDM	
	pada sistem	ketahanan	Budaya	Modal Manusia	yang	Petani dan	
	pertanian	terhadap dampak	Dampak Dari	4. Pergeseran	Berkelanjutan	kelompoktani dalam	
	tradisional, juga	bencana dan	Teknologi	Struktur Kelas	3. Ketahanan	mengadopsi	
	lemahnya SDM	perubahan Iklim	Informasi	Masyarakat	Pangan Sebagai	teknologi dan Belum	
	Petani dan			5. Rendahnya	Dampak	optimalnya	
	manajeman			Produktivitas	Meningkatnya	kelembagaan tani	
	kelompoktani Populasi		Populasi dan	dan peran kelompok			
					Perubahan Iklim	tani dalam	
	2. Masih belum			119	penguatan ekonomi		
	optimalnya upaya					lokal	
	peningkatan					179	

Produksi dan		2.Produksi dan
		Produktivitas hasil
produksi pertanian		
serta Pertanian yang		pertanian belum
Berkelanjutan		optimal akibat belum
disebabkan belum		optimalnya sarana
optimalnya		dan prasarana
keberadaan sarana		produksi dan
dan prasana yang		rendahnya juga
memadai		efisiensi usaha tani
		termasuk pengaruh
3. Belum kuatnya		Alih fungsi lahan
sektor hilir dan serta		dan belum
upaya Peningkatan		optimalnya
Nilai Tambah		perlindungan lahan
Produk pertanian		pertanian
sehingga upaya		berkelanjutan dalam
peningkatan nilai		menuju Tapin
tambah juga belum		sebagai Lumbung
terjadi secara		pangan bagi provinsi
optimal		Kalimantan Selatan
		3.Rendahnya daya
4. Selain hal ditas yang		saing dan nilai
terkait Perangkat		tambah hasil
Daerah adalah		pertanian karena
masih didapati juga		lemahnya hilirisasi
permasalahan pada		dan akses pasar
aspek internal		4.Akuntabilitas,
seperti kemampuan		program dan
manajerial		kegiatan belum
manajonar		nosiatan beram

khususnya pada			optimal karena
Akuntabilitas			belum sepenihnya
kinerja dan			berbasis data dan
profesionalisme			evaluasi yang kuat
Aparatur Sipil			5.Profesionalisme
Negara.			ASN pertanian masih
			perlu ditingkatkan,
			terutama dalam hal
			adaptasi teknologi
			agar semua dapat
			mendukung tujuan
			peningkatan
			pemberdayaan
			petani dan
			kelompoktani

Dari hasil analisis dapat diidentifikasi isu Strategis pada Dinas Pertanian di Kabupaten Tapin adalah sebagaimana berikut :

- 1. Masih belum optimalnya pertumbuhan komoditas pertanian unggulan secara berkelanjutan untuk menuju Tapin sebagai kawasan agropolitan , hal ini juga karena masih rendahnya SDM Petani dan kelompoktani dalam mengadopsi teknologi khususnya Teknologi Tepat Guna dan Belum optimalnya kelembagaan tani dan peran kelompok tani dalam penguatan ekonomi lokal.
- 2. Produksi dan Produktivitas hasil pertanian belum optimal akibat belum optimalnya sarana dan prasarana produksi dan rendahnya juga efisiensi usaha tani termasuk pengaruh Alih fungsi lahan dan belum optimalnya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dalam menuju Tapin sebagai Lumbung pangan bagi provinsi Kalimantan Selatan .
- 3. Rendahnya daya saing dan nilai tambah hasil pertanian karena lemahnya hilirisasi dan akses pasar .

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan teperumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. **Tujuan** pembangunan Pertanian tahun 2025-2029 adalah **"Meningkatkan kualitas pertumbuhan komoditas pertanian"** dengan Indikator "Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan Dan Jasa Pertanian (%)"

Adapun Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Adapun sasaran pembangunan Pertanian tahun 2025-2029 adalah sebagai Berikut:

- 1. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan komoditas pertanian
- 2. Meningkatnya Produksi Pertanian
- 3. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian
- 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 5. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Berkaitan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tapin disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.9 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Tapin

	TUJUAN SASAI			BASELINE		Т	'ARGET	`TAHU	N	
NISPK		SASARAN		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3		6	7	8	9	10	11
Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor Pertanian		LPE subkategori pertanian peternakan perburuan dan jasa pertanian (Persen)	2,71	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
		Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan Produksi Padi (Persen)	4,50	1,50	1,51	1,52	1,53	1,54	1,55
			Persentase peningkatan Produksi Cabai Rawit Hiyung (Persen)	3,35	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00
			Persentase peningkatan Produksi Jahe (Persen)	4,39	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	5,00
			Persentase peningkatan Produksi Jeruk (Persen)	-17,78	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
			Persentase peningkatan Produksi Karet (Persen)	1,82	2,10	2,20	2,30	2,30	2,40	2,50

	TUJUAN SASARAN		INDIKATOR	BASELINE		1	`ARGE1	TAHU	N	
NISPK		SASARAN		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3		6	7	8	9	10	11
			Persentase peningkatan Produksi Kelapa Sawit (Persen)	31,99	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50
			Persentase peningkatan Produksi Daging (Persen)	31,52	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50
			Persentase peningkatan Produksi Telur (Persen)	24,10	5,00	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50
		Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian	Persentase peningkatan kelompoktani yg meningkatkan nilai tambah produk pertanian (Persen)	13,99	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Skor)	76,40	81,00	81,50	82,00	83,50	84,00	84,50
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Skor)	-	80,00	80,30	80,70	90,10	90,30	90,50

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pedagangan Kabupaten Tapin 2025-2029 selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029. Adapun **Strategi** Dinas Pertanian Kabupaten Tapin adalah sbb :

- 1. Penguatan semua komoditas unggulan dalam upaya peningkatan produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, perkebunan dan Peternakan) secara optimal dan berkelanjutan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha
- 2. Penguatan khususnya pada Tanaman pangan utama yaitu padi utk menjamin ketersediaan beras secara cukup, surplus dan berkelanjutan.
- 3. Pengembangan potensi lahan yang beraneka ragam sebagai tempat usahatani Hortikultura sehingga berkembang menjadi cluster-cluster komoditas yang mapan
- 4. Pengembangan sentra sentra produksi pangan secara optimal yang mengacu pada agribisnis menuju kawasan agropolitan
- 5. Hilirisasi Seluruh potensi produk unggulan pertanian dengan memberkan peningkatan nilai produk dan pasar dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal yang bermuara pada pembangunan kawasan agropolitan berbasis korporasi petani
- 6. Meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan tani dalam pengembangan pertanian berkelanjutan
- 7. Meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tufoksi pada seluruh unit perangkat daerah
- 8. Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas ASN bidang pertanian

Adapun yang Menjadi **Arah Kebijakan** Dinas Pertanian dalam mencapai tujuan dan Sasaran adalah :

- 1. Penguatan kapasitas SDM petani dan kelompok tani melalui pelatihan berbasis teknologi pertanian
- 2. Penguatan kelembagaan petani melalui fasilitasi kelembagaan ekonomi petani dan koperasi
- Peningkatan peran penyuluh pertanian dalam pendampingan dan pengembangan kelompok tani
- 4. Peningkatan akses dan kualitas sarana dan prasarana produksi pertanian
- 5. Pengembangan sistem usaha tani terpadu dan berbasis kawasan
- 6. Optimalisasi pemanfaatan alsintan (alat dan mesin pertanian)
- 7. Pencegahan alih fungsi lahan dan penguatan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
- 8. Pengembangan hilirisasi produk pertanian melalui fasilitasi UMKM dan industri rumah tangga pertanian
- 9. Peningkatan akses pasar melalui digitalisasi pemasaran dan penguatan jaringan distribusi
- 10. Penguatan branding dan sertifikasi produk unggulan daerah
- 11. Penguatan basis data sektor pertanian melalui digitalisasi dan integrasi sistem informasi pertanian
- 12. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data dan evaluasi kinerja
- 13. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi
- Penguatan kompetensi ASN melalui pelatihan dan sertifikasi teknis pertanian
- 15. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja ASN
- Pengembangan budaya kerja berbasis inovasi dan pelayanan prima

Dalam melaksanakan kinerja pembangunan tahunan, maka perlu disusun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun penahapan pembangunan RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Tapin 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.10 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

ТАНАР I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
1	2	3	4	5
Perbaikan Pondasi	Optimalisasi Sarana-	Peningkatan Nilai	Penguatan	Konsolidasi,
Peningkatan Kapasitas	Prasarana dan Usaha	Tambah dan Akses	Ketahanan	Evaluasi, dan
dan Kelembagaan Petani	Tani	Pasar Produk	Pangan dan	Peningkatan Daya
		Pertanian	Perlindungan	Saing Pertanian
			Lahan Pertanian	Tapin
Melalui penguatan pada:				
	Melalui penguatan pada :	Melalui Penguatan pada	Melalui Penguatan	
- Pelatihan dan		:	pada:	Melalui Penguatan
pendampingan teknis bagi	-Penyediaan dan			pada:
petani dan kelompok tani	modernisasi sarana	- Fasilitasi hilirisasi	Implementasi	
- Pemetaan dan penguatan	produksi dan alsintan	produk pertanian	regulasi	- Evaluasi capaian
kelembagaan kelompok tani	- Rehabilitasi irigasi	melalui UMKM dan	perlindungan	indikator kinerja
- Inventarisasi lahan	pertanian dan jalan	koperasi	lahan pertanian	pertanian
pertanian strategis dan	usaha tani	- Pengembangan	pangan	- Pengembangan
penyusunan data base	- Penerapan model usaha	branding dan sertifikasi	berkelanjutan	sistem informasi
pertanian	tani terpadu berbasis	produk unggulan		pertanian
	kawasan	- Penguatan akses pasar	// (terintegrasi
		digital dan fisik		- Persiapan

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
1	2	3	4	5
				rancangan Renstra periode berikutnya berdasarkan evaluasi menyeluruh

Tabel 3.11 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALNIS ASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas perekonomian yang	Pengembangan produktivitas sektor pertanian sebagai	Penguatan kapasitas SDM petani dan kelompok tani melalui pelatihan berbasis teknologi pertanian	Misi Ke 2 RPJMD Meningkatkan
	maju dan berkelanjutan	penyangga pangan nasional dan pariwisata unggulan daerah	2. Penguatan kelembagaan petani melalui fasilitasi kelembagaan ekonomi petani dan koperasi	Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah

NO	OPERASIONALNIS ASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	КЕТ.
1	2	3	4	5
			3. Peningkatan peran penyuluh pertanian	Berbasis Pertanian,
			dalam pendampingan dan pengembangan	Peternakan, Perikanan,
			kelompok tani	Pariwisata dan Industri
			4. Peningkatan akses dan kualitas sarana dan	Kreatif
			prasarana produksi pertanian	
			5. Pengembangan sistem usaha tani terpadu	
			dan berbasis kawasan	
			6. Optimalisasi pemanfaatan alsintan (alat	
			dan mesin pertanian)	
			7. Pencegahan alih fungsi lahan dan	
			penguatan regulasi perlindungan lahan pertanian	
			pangan berkelanjutan	
			8. Pengembangan hilirisasi produk pertanian	
			melalui fasilitasi UMKM dan industri rumah	10000
			tangga pertanian	00000
			9. Peningkatan akses pasar melalui	
			digitalisasi pemasaran dan penguatan jaringan	19 10000
			distribusi	1200000

NO	OPERASIONALNIS ASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	КЕТ.
1	2	3	4	5
			10. Penguatan branding dan sertifikasi produk	
			unggulan daerah	
			11. Penguatan basis data sektor pertanian	
			melalui digitalisasi dan integrasi sistem informasi	
			pertanian	
			12. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis	
			data dan evaluasi kinerja	
			13. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi	
			berbasis teknologi	
			14. Penguatan kompetensi ASN melalui	
			pelatihan dan sertifikasi teknis pertanian	
			15. Pemanfaatan teknologi informasi untuk	
			mendukung kinerja ASN	
			16. Pengembangan budaya kerja berbasis	10000
			inovasi dan pelayanan prima	VOX 2000

NO	OPERASIONALNIS ASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	кет.
1	2	3	4	5
		Pengembangan		
		produktivitas sektor		
		pertanian dan		
		pariwisata unggulan		
		daerah		



3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tapin ditujukan untuk memahami arah pembangunan selama kepemimpinan yang akan dilaksanakan dan untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor-faktor pendukung (penghambat dan pendorong) pelayanan SKPD vang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bu[ati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 menetapkan bahwa Visi Pembangunan Daerah untuk lima tahun kedepan adalah:

"TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)"

Dalam rumusan visi ini terkandung rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Tapin di tahun 2029. Rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Tapin dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Sejahtera dan Agamis, terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Tapin yang berkualitas dan sejahtera serta saling berdampingan antar umat beragama;
- 2. Maju, tercapainya pertumbuhan ekonomi secara konsisten dan kemandirian ekonomi daerah serta pemenuhan pembangunan infrastruktur yang handal.
- 3. Berkelanjutan, terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta ketahanan bencana yang responsif.
- 4. Berintegritas dan inovatif, terwujudnya sistem dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas dengan dukungan ASN

yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Tapin

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) MISI 1: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi, Pelaksanaan ini diimplementasikan misi dengan upava percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas Pendidikan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan Gender, Disabilitas, dan inklusi sosial.
- 2) MISI 2: Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif, terciptanya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah dengan fokus pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM serta optimalisasi pembangunan pariwisata.
- Pelayanam Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang, Membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar, dll), terutama pada wilayah kantong- kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur Desa dan Kawasan perdesaan, dan pembangunan daerah Tangguh Bencana melalui pelestarian lingkungan.
- 4) MISI 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang
 Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana,
 pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan

memperhatikan keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan serta peningkatan pengelolaan ketahanan bencana.

5) MISI 5: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan *merit system* serta memperkuat partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Tapin Periode Tahun 2025-2029 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, serta mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Tapin, maka pembangunan Sektor Pertanian guna mewujudkan Misi, Kedua yaitu Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif, dan misi kelima Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.

2.5 3.4 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI

Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI, Renstra Badan Pangan Nasional dan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan

Visi Kementerian Pertanian

Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI dilakukan untuk mengoptimalkan potensi Kalimantan Selatan serta mensinkronkan kebijakan dan program pusat dan daerah. Visi dari Kementerian Pertanian yakni:

"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri

(pangan mandiri) yang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

Pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Misi Kementerian Pertanian

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

- a. Mewujudkan ketahanan pangan;
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta;
- c. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian;

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu

menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Tujuan

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
- c. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2025-2029, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian telah Pertanian menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective.

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2025-2029 adalah:

Sasaran strategis Kementerian terdiri atas sembilan poin utama, mencakup:

- 1. Ketersediaan pangan strategis nasional,
- 2. Peningkatan ekspor dan daya saing,
- 3. Keamanan dan mutu pangan,
- 4. Pemanfaatan inovasi dan teknologi,
- 5. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian,
- 6. Pengendalian hama, penyakit, dan dampak perubahan iklim,
- 7. Peningkatan kapasitas SDM pertanian,
- 8. Reformasi birokrasi, dan
- 9. Akuntabilitas anggaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian sehingga dapat dipertanggujawabkan pelaksanaannya.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.12 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIAT		SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkat nya kemandiri an ekonomi yang maju, tumbuh dan	Meningkat nya pembangu nan ekonomi sektor unggulan daerah	Meningkat nya Produksi Pertanian	Meningkat nya luas panen Tanaman Pangan		Jumlah Luas panen Padi	3.27 . 02 Program Penyediaan Dan Pengemban gan Sarana Pertanian		
produktif			Meningkat nya produktivit as Tanaman Pangan		Produktivitas Padi			
			Meningkat nya luas panen Hortikultur a		Jumlah Luas Panen Cabe Rawit hiyung			
					Jumlah Luas Panen Jahe	80		
					Jumlah Luas Panen Jeruk	1000		

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRAI	JB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Meningkat nya produktivit as Hortikultur a		Produktivitas Cabai Rawit Hiyung			
					Produktivitas jahe			
					Produktivitas Jeruk			
			Meningkat nya luas panen Perkebuna n		Jumlah Luas panen Karet			
					Jumlah Luas panen Kelapa Sawit			
			Meningkat nya produktivit as Perkebuna n		Produktivitas Karet	0		
					Produktivitas Kelapa Sawit	1000		
			Meningkat nya		Populasi Ternak Sapi			

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			populasi ternak					
					Populasi Ternak Kambing			
					Populasi Ternak Unggas			
			Meningkat nya pengelolaa n pasca panen		persentase kelompok tani yang melakukan pasca panen Tanaman Pangan			
			Meningkat nya pengelolaa n pasca panen		persentase kelompok tani yang melakukan pasca panen Hortikultura			
			Meningkat nya pengelolaa n pasca panen		persentase kelompok tani yang melakukan pasca panen Perkebunan			
				Meningkatny a Pertanaman komoditas unggulan Tanaman Pangan	Luas Pertanaman Padi		3.27 . 02 . 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatny a penggunaan bibit unggul	persentase penggunaan bibit unggul (Padi)			
				Meningkatny a Pertanaman komoditas unggulan	Luas Pertanaman Cabai Rawit Hiyung			
					Luas Pertanaman Jahe			
					Luas Pertanaman Jeruk			
				Meningkatny a penggunaan bibit unggul Hortikultura	persentase penggunaan bibit unggul (Cabai Hiyung)			
					persentase penggunaan bibit unggul (Jahe)			

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					persentase penggunaan bibit unggul (Jeruk)			
				Tersedianya sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan	Rasio ketersediaan alat Mesin Pengolahan Hasil Hortikultura (persen)			
				Meningkatny a Pertanaman komoditas unggulan Perkebunan	Jumlah Rehabilitasi Karet (ha)			
					Jumlah pertanaman Kelapa Sawit Rakyat (Ha)			
				Meningkatny a penggunaan bibit unggul	persentase penggunaan bibit unggul (Karet)	9_		
					persentase penggunaan bibit unggul (Kelapa Sawit)			

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tersedianya bahan obat- obatan pengendalian organisme pengganggu tanaman	persentase terpenuhinya usulan kelompok tani (Perkebunan)			
				Tersedianya sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan	Rasio ketersediaan alat Mesin Pengolahan Hasil Perkebunan			
				Tersedianya alat mesin pertanian	rasio ketersediaan alat mesin pertanian pra panen			
					rasio ketersediaan alat mesin pertanian Pasca Panen			
				Tersedianya pupuk bersubsidi	persentase terpenuhinya usulan pupuk bersubsidi	See		
					persentase distribusi pupuk organik kepada poktan	3000		

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRAI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Persentase Pelaku Pengolahan Hasil Peternakan yang dibina dan baik				
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			3.27 . 02 . 2.01 . 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			3.27 . 02 . 2.01 . 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			•		Jumlah pengawasan penggunaan saranapengolahanhasi l tanaman pangan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura Jumlah benih bersertifikat	•		Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura Perbanyakan Benih	
					hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak			Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
					Jumlah peternak (Sapi,Kambing dan Unggas)		3.27 . 02 . 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran		

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				-			Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/K		
					Peserta pembinaan yang meningkat populasi ternaknya		ota		
					Persentase peserta bimbingan teknis yang direkomendasikan untuk dibina				
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanama n Skala Kecil			3.27 . 02 . 2.03 . 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Ta naman Skala Kecil	
					Persentase kelahiran insemenasi buatan pada sapi	366	3.27 . 02 . 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan		

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/K ota	
					Persentase inseminator bersertifikat ATR			
					Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan			3.27 . 02 . 2.05 . 06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
					Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	8.0		3.27 . 02 . 2.05 . 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
					Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	1000		3.27 . 02 . 2.05 . 04 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Meningkat nya kuantitas dan kualitas sarana & prasarana produksi		persentase pemenuhan sarana dan prasarana produksi	3.27 . 03 Program Penyediaan Dan Pengemban gan Prasarana Pertanian			
			produksi		persentase pemenuhan sarana dan prasarana produksi dengan kondisi baik	rereamen			
				Meningkatka n Akses Pembiayaan dan Investasi Pertanian	Persentase usulan yang di setujui (Persen)		3.27 . 03 . 2.01 Pengembanga n Prasarana Pertanian		
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			3.27 . 03 . 2.01 . 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
2	3	4	5	6	7	8	9
				Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	•		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B di Kabupaten/Kota
				Jumlah Action Plan PengembanganPrasara na,Sarana, Kawasan Pertanian			Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
			Tersedianya Jalan Usaha Tani & Jalan Usaha Produksi	Persentase pemenuhan jalan Usaha Tani yg diusulkan Masyarakat Persentase pemenuhan jalan produksi ya diusulkan		3.27 . 03 . 2.02Pembang unan Prasarana Pertanian	
	2	2 3	2 3 4	Tersedianya Jalan Usaha Tani & Jalan Usaha	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola Jumlah Action Plan PengembanganPrasara na,Sarana, Kawasan Pertanian Tersedianya Jalan Usaha Tani & Jalan Usaha Produksi Persentase pemenuhan jalan Usaha Tani yg diusulkan Masyarakat Persentase	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola Jumlah Action Plan PengembanganPrasara na,Sarana, Kawasan Pertanian Tersedianya Jalan Usaha Tani & Jalan Usaha Tani & Jalan Usaha Produksi Persentase pemenuhan jalan diusulkan Masyarakat Persentase pemenuhan jalan produksi yg diusulkan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola Jumlah Action Plan PengembanganPrasara na, Sarana, Kawasan Pertanian Tersedianya Jalan Usaha Tani & Jalan Usaha Tani & Jalan Usaha Produksi Persentase pemenuhan jalan Usaha Produksi Persentase pemenuhan jalan produksi yg diusulkan Prasarana Pertanian

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRAI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			3.27 . 03 . 2.02 . 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			3.27 . 03 . 2.02 . 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara			3.27 . 03 . 2.02 . 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
			Meningkat nya pengendali an terhadap penyakit hewan		Persentase hewan bebas penyakit	3.27 . 04 Program Pengendalia n Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tersedianya obat dan vaksin pada pengendalian penyakit hewan	persentase terpenuhinya obat dan vaksin		3.27 . 04 . 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/K ota	
				Tersedianya petugas medis dan paramedis veteriner	Rasio terpenuhinya medis dan paramedis veteriner			
					Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali			Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
				Terlaksanany a Pengawasan Pemasukan dan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan		3.27 . 04 . 2.02 Pengawasan Pemasukan dan	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	ОИТРИТ	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/K ota	dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/K ota		
					Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	
				Terlaksanany a Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/K ota terlaksana	Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota terlaksana		3.27 . 04 . 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/K ota		

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Jumlah Penyediaan Pelayanan Jasa Labboratorium			Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
				Tersedianya sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan	Persentase Pelaku Pengolahan Hasil Peternakan yang dibina dan baik		3.27 . 04 . 2.04 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		
					Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan		Vetermer	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	
					Persentase intensitas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dibawah ambang batas (Tanaman Pangan)	3.27 . 05 Program Pengendalia n Dan Penanggula ngan Bencana Pertanian			
					Persentase intensitas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dibawah				

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					ambang batas (Hortikultura)				
					Persentase intensitas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dibawah ambang batas (Perkebunan)				
				Meningkatny a pengendalian terhadap organisme penggangu tanaman Pangan	Persentase terpenuhinya usulan kelompok tani (Tanaman Pangan)		3.27 . 05 . 2.01 Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian Kabupaten/K ota		
				Meningkatny a pengendalian terhadap organisme penggangu tanaman Hortikutura	Persentase terpenuhinya usulan kelompok tani (Hortikultura)		ota		
				Meningkatny a pengendalian terhadap organisme	Persentase terpenuhinya usulan kelompok tani (Perkebunan)	356			

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				penggangu tanaman Perkebunan				
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			3.27 . 05 . 2.01 . 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
					Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
					Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan			Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	ОИТРИТ	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						
1	1 2 3 4		4	5	6	7	8	9				
			Meningkat nya Perijinan yang dipenuhi	Terlaksanany a Penerbitan Izin	Persentase Perijinan yang dipenuhi Persentase Penerbitan Izin (Rekomendasi) Usaha Pertanian yang	3.27 . 06 Program Perizinan Usaha Pertanian	3.27 . 06 . 2.01 Penerbitan					
				(Rekomendas i) Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/K ota	kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota		Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/K ota					
					Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	566		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	ОИТРИТ	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
			Meningkat nya kapasitas penyuluh dan kelompok tani		Persentase kenaikan kelas kelompok tani lanjut ke Madya	3.27 . 07 Program Penyuluhan Pertanian						
					Persentase Penyuluh yang berkompeten							
					Persentase alat/media penyuluhan pertanian yang dipublikasikan (Persen)							
				Terlakasanan ya Bimbingan Teknis Penyuluhan	persentase peserta bimbingan teknis penyuluhan yang mendapatkan sertifikat		3.27 . 07 . 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					
				Terlakasanan ya Penyediaan Media Penyuluhan	Persentase Media penyuluhan yang distribusikan	80						
				Terlakasanan ya Bimbingan Teknis Petani	persentase peserta bimbingan teknis dengan nilai postes baik							

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						
1	1 2 3 4	5	6	7	8	9						
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yg dimanfaatkan			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana danPrasarana Penyuluhan Pertanian				
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				
					Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk			Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani				

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
					Jumlahpenyuluhperta			Penyediaan dan				
					nian yang			Peningkatan				
					tersedia dan			Kapasitas				
					ditingkatkan			Penyuluh				
					kapasitasnya			pertanian				
					Jumlahkelembagaanp			Penguatan				
					enyuluhan			Kelembagaan				
					pertanian di tingkat			penyuluhan pertanian di				
					kabupaten/kotayangdi			Tingkat				
					tingkatkan			Kabupaten/Kota				
					kapasitasnya			,				
					Jumlah diseminasi			Diseminasi				
					informasi			Informasi				
								Teknis, Sosial,				
					teknis,sosial,ekonomid			Ekonomi dan				
					aninovasi			Inovasi				
					pertanian			Pertanian				

4.2 Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Pertumbuhan Pertanian di Kabupaten Tapin sangat berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin. Pemerintah memfasilitasi sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dengan memdayagunakan keterpaduan kegiatan yang dibiayai oleh APBD, APBN, Swasta dan sumber-sumber dana pembangunan lainnya.

Impelementasi pembangunan perlu adanya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapin guna tercapainya Program Pembangunan selama kurun waktu 2025-2030. Rencana Pendanaan Indikatif kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.13 Rencana Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG										TARGET	DAN PAGI	J INDIKA	TIF TAHU	JN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025		2026			2027			2028			2029		2030				
	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	KET
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%		100	%	23.29 5.019. 769	100	%	25.62 4.521. 746	100	%	28.18 6.973. 920	100	%	31.00 5.671. 313	100	%	34.10 6.238. 444	100	%	37.51 6.862. 288	DIN AS PER TANI AN
	Perencanaan Kinerja (AKIP)		24	Skor		24	Skor		24	Skor		24	Skor		24	Skor		24	Skor		
	Pengukuran Kinerja (AKIP)		24	Skor		24	Skor		24	Skor		24	Skor		24	Skor		24	Skor		
	Pelaporan Kinerja (AKIP)		12	Skor		13	Skor		13	Skor		14	Skor		14	Skor		15	Skor		
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		20	Skor		20	Skor		21	Skor		22	Skor		23	Skor		24	Skor		
	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang ditindaklanju ti		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		
	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		
3.27 . 01 . 2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase rekomendasi LHE AKIP		100	%	61.20 0.000	100	%	67.32 0.000	100	%	74.05 2.000	100	%	81.45 7.200	100	%	89.60 2.920	100	%	98.56 3.212	

BIDANG				TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																	
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026			2027			2028			2029			2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TARGET		PAGU	TARGET PAGU		TARGET		PAGU	AGU TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	КЕТ	
Kinerja Perangkat Daerah	yang ditindak lanjuti																				
	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklajuti		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		
3.27 . 01 . 2.01 . 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12	lapor an	61.20 0.000	12	lapor an	67.32 0.000	12	lapor an	74.05 2.000	12	lapor an	81.45 7.200	12	lapor an	89.60 2.920	12	lapor an	98.56 3.212	
3.27 . 01 . 2.02Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggunga jawaban yang sesuai dengan standar penatausaha an keuangan		100	%	15.99 6.991. 574	100	%	17.59 6.690. 731	100	%	19.35 6.359. 805	100	%	21.29 1.995. 785	100	%	23.42 1.195. 363	100	%	25.76 3.314. 900	

BIDANG										TARGET	DAN PAG	U INDIKA	TIF TAHU	IN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026			2027			2028			2029			2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAF	RGET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	RGET	PAGU	КЕТ
	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintaha n (SAP)		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		
3.27 . 01 . 2.01 . 06 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100	Oran g/bul an	15.89 6.179. 474	105	Oran g/bul an	17.48 5.797. 421	110	Oran g/bul an	19.23 4.377. 164	115	Oran g/bul an	21.15 7.814. 880	120	Oran g/bul an	23.27 3.596. 368	125	Oran g/bul an	25.60 0.956. 005	
3.27 . 01 . 2.02 . 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1	Doku men	100.8 12.10 0	1	Doku men	110.8 93.31 0	1	Doku men	121.9 82.64 1	1	Doku men	134.1 80.90 5	1	Doku men	147.5 98.99 6	1	Doku men	162.3 58.89 5	
3.27 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik		100	%	2.060. 740.8 00	100	%	2.266. 814.8 80	100	%	2.493. 496.3 68	100	%	2.742. 846.0 05	100	%	3.017. 130.6 05	100	%	3.318. 843.6 66	
	Persentase kelulusan ASN		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		

BIDANG										TARGET	DAN PAGI	J INDIKA	TIF TAHL	JN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025	I		2026	ı		2027			2028	ı		2029	ı		2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAF	RGET	PAGU	TAF	RGET	PAGU	TAF	:GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	:GET	PAGU	TAF	RGET	PAGU	KET
	Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas																				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	pake t	143.1 00.30 0	4	pake t	157.4 10.33 0	4	pake t	173.1 51.36 3	4	pake t	190.4 66.49 9	4	pake t	209.5 13.14 9	4	pake t	230.4 64.46 4	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4	pake t	404.9 95.60 0	4	pake t	445.4 95.16 0	4	pake t	490.0 44.67 6	4	pake t	539.0 49.14 4	4	pake t	592.9 54.05 8	4	pake t	652.2 49.46 4	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	pake t	80.09 0.100	4	pake t	88.09 9.110	4	pake t	96.90 9.021	4	pake t	106.5 99.92 3	4	pake t	117.2 59.91 5	4	pake t	128.9 85.90 7	
Penyediaan Bahan/Materi al	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan		4	pake t	50.04 4.600	4	pake t	55.04 9.060	4	pake t	60.55 3.966	4	pake t	66.60 9.363	4	pake t	73.27 0.299	4	pake t	80.59 7.329	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	lapor an	17.23 8.200	1	lapor an	18.96 2.020	1	lapor an	20.85 8.222	1	lapor an	22.94 4.044	1	lapor an	25.23 8.449	1	lapor an	27.76 2.293	
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan		1	lapor an	1.365. 272.0 00	1	lapor an	1.501. 799.2 00	1	lapor an	1.651. 979.1 20	1	lapor an	1.817. 177.0 32	1	lapor an	1.998. 894.7 35	1	lapor an	2.198. 784.2 09	

BIDANG										TARGET	DAN PAGU	J INDIKA	TIF TAHU	IN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026			2027			2028			2029			2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAF	RGET	PAGU	TAR	RGET	PAGU	TAF	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	:GET	PAGU	TAR	RGET	PAGU	KET
	Konsultasi SKPD																				
3.27 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset daerah yang tercatat sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan		100	%	1.075. 149.0 00	100	%	1.182. 663.9 00	100	%	1.300. 930.2 90	100	%	1.431. 023.3 19	100	%	1.574. 125.6 51	100	%	1.731. 538.2 16	
3.27 . 01 . 2.07 . 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		50	unit	1.075. 149.0 00	50	unit	1.182. 663.9 00	50	unit	1.300. 930.2 90	50	unit	1.431. 023.3 19	50	unit	1.574. 125.6 51	50	unit	1.731. 538.2 16	
3.27 . 01 . 2.07 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan layanan Telpon Internet Listrik dan Air dalam kondisi baik		100	Pers en	1.110. 878.3 28	100	Pers en	1.221. 966.1 61	100	Pers en	1.344. 162.7 77	100	Pers en	1.478. 579.0 55	100	Pers en	1.626. 436.9 60	100	Pers en	1.789. 080.6 56	
3.27 . 01 . 2.08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	lapor an	654.6 83.36 8	1	lapor an	720.1 51.70 5	1	lapor an	792.1 66.87 5	1	lapor an	871.3 83.56 3	1	lapor an	958.5 21.91 9	1	lapor an	1.054. 374.1 11	
3.27 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1	lapor an	456.1 94.96 0	1	lapor an	501.8 14.45 6	1	lapor an	551.9 95.90 2	1	lapor an	607.1 95.49 2	1	lapor an	667.9 15.04 1	1	lapor an	734.7 06.54 5	

BIDANG										TARGET	DAN PAGI	U INDIKA	TIF TAHL	JN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026			2027			2028			2029			2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAR	:GET	PAGU	TAR	RGET	PAGU	TAF	RGET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	:GET	PAGU	TAF	RGET	PAGU	KET
Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																				
3.27 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		90	%	2.990. 060.0 67	90	%	3.289. 066.0 74	90	%	3.617. 972.6 81	90	%	3.979. 769.9 49	90	%	4.377. 746.9 44	90	%	4.815. 521.6 39	
3.27 . 01 . 2.09 . 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		125	Unit	492.6 46.11 5	125	Unit	541.9 10.72 7	125	Unit	596.1 01.79 9	125	Unit	655.7 11.97 9	125	Unit	721.2 83.17 7	125	Unit	793.4 11.49 5	
3.27 · 01 · 2.09 · 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30	Unit	30.38 5.902	30	Unit	33.42 4.492	30	Unit	36.76 6.941	30	Unit	40.44 3.636	30	Unit	44.48 7.999	30	Unit	48.93 6.799	
3.27 . 01 . 2.09 . 10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		15	Unit	2.467. 028.0 50	15	Unit	2.713. 730.8 55	15	Unit	2.985. 103.9 41	15	Unit	3.283. 614.3 35	15	Unit	3.611. 975.7 68	15	Unit	3.973. 173.3 45	

BIDANG										TARGET	DAN PAGI	U INDIKA	TIF TAHU	JN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026			2027			2028			2029			2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAR	RGET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	(GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	KET
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi																				
3.27 . 02 Program Penyediaan Dan Pengembanga n Sarana Pertanian	Jumlah Luas panen Padi		40.7 70,52	На	6.705. 954.6 87	41.3 82,08	На	7.376. 550.1 56	42.0 02,81	На	8.114. 205.1 71	42.6 32,85	На	8.925. 625.6 88	43.2 72,34	На	9.818. 188.2 57	43.9 21,43	На	10.80 0.007. 083	
	Produktivitas Padi		51,51	Kuint al/H a		51, 52	Kuint al/H a		51,53	Kuint al/H a		51,54	Kuint al/H a		51,55	Kuint al/H a		51,56	Kuint al/H a		
	Jumlah Luas Panen Cabe Rawit hiyung		2056, 56	На		2159, 39	На		2267, 36	На		2380, 73	На		2499, 76	На		2624, 75	На		
	Jumlah Luas Panen Jahe		978,5 3	На		1.02 7,45	На		1.07 8,83	На		1.13 2,77	На		1.18 9,40	На		1.24 8,87	На		
	Jumlah Luas Panen Jeruk		15.4 32,04	На		15.4 47,47	На		15.4 93,82	На		15.5 86,78	На		15.7 27,06	На		15.8 84,33	На		
	Produktivitas Cabai Rawit Hiyung		88,01	Kuint al/H a		88,05	Kuint al/H a		88,10	Kuint al/H a		88,15	Kuint al/H a		88,20	Kuint al/H a		88,25	Kuint al/H a		
	Produktivitas jahe		136,0 7	Kuint al/H a		136,1 0	Kuint al/H a		136,1 2	Kuint al/H a		136,1 5	Kuint al/H a		136,1 7	Kuint al/H a		136,2 0	Kuint al/H a		
	Produktivitas Jeruk		210,0 6	Kuint al/H a		210. 07	Kuint al/H a		210,0 8	Kuint al/H a		210. 09	Kuint al/H a		210,1 0	Kuint al/H a		210,1 1	Kuint al/H a		
	Jumlah Luas panen Karet		13.5 62,48	На		13.5 76,04	На		13.5 89,61	На		13.6 03,20	На		13.6 16,81	На		13.6 30,42	На		
	Jumlah Luas panen Kelapa Sawit		12.5 05,23	На		12.5 67,76	На		12.6 30,59	На		12.6 93,75	На		12.7 57,22	На		12.8 21,00	На		

BIDANG		_								TARGET	DAN PAGI	J INDIKA	TIF TAHU	IN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025	T		2026	ī		2027			2028	ī		2029	_		2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAR	GET	PAGU	TAR	RGET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	:GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	KET
	Produktivitas Karet		673,6 7	Kg/H a		677,0 4	Kg/H a		680,4 2	Kg/H a		683,8 3	Kg/H a		687,2 4	Kg/H a		690,6 8	Kg/H a		
	Produktivitas Kelapa Sawit		1.48 2,55	Kg CPO/ Ha		1.48 9,96	Kg CPO/		1.49 7,41	Kg CPO/		1.50 4,90	Kg CPO/ Ha		1.51 2,42	Kg CPO/		1.51 9,98	Kg CPO/ Ha		
	Populasi Ternak Sapi		10.0 41,42	Ekor		10.0 91,63	Ekor		10.1 42,09	Ekor		10.1 92,80	Ekor		10.2 43,76	Ekor		10.2 94,98	Ekor		
	Populasi Ternak Kambing		7.51 4,40	Ekor		7.55 1,97	Ekor		7.58 9,73	Ekor		7.62 7,68	Ekor		7.66 5,82	Ekor		7.70 4,15	Ekor		
	Populasi Ternak Unggas		3.23 9.87 2,95	Ekor		3.25 6.07 2,31	Ekor		3.27 2.35 2,68	Ekor		3.28 8.71 4,44	Ekor		3.30 5.15 8,01	Ekor		3.32 1.68 3,80	Ekor		
	persentase kelompok tani yang melakukan pasca panen Tanaman Pangan		8,00	pers en		8,50	pers en		9,00	pers en		9,50	pers en		10,00	pers en		10,50	pers en		
	persentase kelompok tani yang melakukan pasca panen Hortikultura		5,00	pers en		5,20	pers en		5,40	pers en		5,60	pers en		5,80	pers en		6,00	pers en		
	persentase kelompok tani yang melakukan pasca panen Perkebunan		6,00	pers en		6,20	pers en		6,40	pers en		6,60	pers en		6,80	pers en		7,00	pers en		
3.27 . 02 . 2.01 Pengawasan Penggunaan	Luas Pertanaman Padi		39.9 75,00	На	4.537. 425.0 65	40.0 14,97	На	4.991. 167.5 72	40.1 35,02	На	5.490. 284.3 29	40.3 75,83	На	6.039. 312.7 62	40.7 39,21	На	6.643. 244.0 38	41.1 46,60	На	7.307. 568.4 41	

BIDANG										TARGET	DAN PAG	U INDIKA	TIF TAHL	JN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026			2027			2028			2029			2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAR	GET	PAGU	TAR	RGET	PAGU	TAF	RGET	PAGU	TAR	IGET	PAGU	TAR	IGET	PAGU	TAR	GET	PAGU	КЕТ
Sarana Pertanian																					
	persentase penggunaan bibit unggul (Padi)		50,00	pers en		50,05	pers en		50,20	pers en		20,00	pers en		25,00	pers en		30,00	pers en		
	Luas Pertanaman Cabai Rawit Hiyung		233,7 0	На		234,8 7	На		236,0 4	На		237,2	На		238,4	На		239,6 0	На		
	Luas Pertanaman Jahe		71,95	На		72,31	На		72,67	На		73,04	На		73,40	На		73,77	На		
	Luas Pertanaman Jeruk		735,8 8	На		739,5 6	На		743,2 6	На		746,9 8	На		750,7 1	На		754,4 6	На		
	persentase penggunaan bibit unggul (Cabai Hiyung)		100,0	pers en		100,0 0	pers en		100,0	pers en		100,0	pers en		100,0	pers en		100,0 0	pers en		
	persentase penggunaan bibit unggul (Jahe)		100,0 0	pers en		50,00	pers en		60,00	pers en		70,00	pers en		80,00	pers en		90,00	pers en		
	persentase penggunaan bibit unggul (Jeruk)		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		
	Rasio ketersediaan alat Mesin Pengolahan Hasil Hortikultura (persen)		50,00	pers en		5,10	pers en		5,20	pers en		5,30	pers en		5,40	pers en		5,50	pers en		

BIDANG										TARGET	DAN PAGI	J INDIKA	TIF TAHU	IN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026			2027			2028			2029			2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAR	GET	PAGU	TAR	:GET	PAGU	TAR	:GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	KET
	Jumlah Rehabilitasi Karet (ha)		100,0 0	На		0,60	На		0,70	На		0,80	На		0,90	На		1,00	На		
	Jumlah pertanaman Kelapa Sawit Rakyat (Ha)		100,0 0	На		6,00	На		6,00	На		6,00	На		6,00	На		6,00	На		
	persentase penggunaan bibit unggul (Karet)		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		
	persentase penggunaan bibit unggul (Kelapa Sawit)		100,0 0	pers en		100	pers en		100	pers en		100	pers en		100	pers en		100	pers en		
	persentase terpenuhinya usulan kelompok tani (Perkebunan)		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0	pers en		
	Rasio ketersediaan alat Mesin Pengolahan Hasil Perkebunan		5,00	pers en		5,10	pers en		5,20	pers en		5,30	pers en		5,40	pers en		5,50	pers en		
	rasio ketersediaan alat mesin pertanian pra panen		6,08	pers en		6,10	pers en		6,20	pers en		6,30	pers en		6,40	pers en		6,50	pers en		
	persentase terpenuhinya		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		

BIDANG										TARGET	DAN PAGI	J INDIKA	TIF TAHU	IN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026			2027			2028			2029			2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	KET
	usulan pupuk bersubsidi																				
	Persentase Pelaku Pengolahan Hasil Peternakan yang dibina dan baik		20,00	pers en		21,00	pers en		22,00	pers en		23,00	pers en		24,00	pers en		25,00	pers en		
3.27 . 02 . 2.01 . 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		4	lapor an	3.017. 881.1 10	4	lapor an	3.319. 669.2 21	4	lapor an	3.651. 636.1 43	4	lapor an	4.016. 799.7 57	4	lapor an	4.418. 479.7 33	4	lapor an	4.860. 327.7 06	
3.27 . 02 . 2.01 . 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampinga n Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		1	lapor an	466.0 00.35 5	1	lapor an	512.6 00.39 1	1	lapor an	563.8 60.43 0	1	lapor an	620.2 46.47 3	1	lapor an	682.2 71.12 0	1	lapor an	750.4 98.23 2	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak		7,00	ton	105.8 36.40 0	7,20	ton	116.4 20.04 0	7,50	ton	128.0 62.04 4	8,00	ton	140.8 68.24 8	8,50	ton	154.9 55.07 3	9,00	ton	170.4 50.58 1	

BIDANG										TARGET	DAN PAG	J INDIKA	TIF TAHU	IN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025	ī		2026	T		2027			2028	1		2029	1		2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAF	RGET	PAGU	TAF	RGET	PAGU	TAF	RGET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	RGET	PAGU	TAR	RGET	PAGU	KET
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan saranapengol ahanhasil tanaman pangan		1	lapor an	123.4 72.80 0	1	lapor an	135.8 20.08 0	1	lapor an	149.4 02.08 8	1	lapor an	164.3 42.29 7	1	lapor an	180.7 76.52 6	1	lapor an	198.8 54.17 9	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura		1	Lapo ran	368.0 89.80 0	1	Lapo ran	404.8 98.78 0	1	Lapo ran	445.3 88.65 8	1	Lapo ran	489.9 27.52 4	1	Lapo ran	538.9 20.27 6	1	Lapo ran	592.8 12.30 4	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak		5.00 0	Bata ng	385.3 00.80 0	5.50 0	Bata ng	423.8 30.88 0	6.00	Bata ng	466.2 13.96 8	6.50 0	Bata ng	512.8 35.36 5	7.00 0	Bata ng	564.1 18.90 1	7.50 0	Bata ng	620.5 30.79 1	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan		1	Lapo ran	30.92 6.400	1	Lapo ran	34.01 9.040	1	Lapo ran	37.42 0.944	1	Lapo ran	41.16 3.038	1	Lapo ran	45.27 9.342	1	Lapo ran	49.80 7.276	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan		1	Lapo ran	39.91 7.400	1	Lapo ran	43.90 9.140	1	Lapo ran	48.30 0.054	1	Lapo ran	53.13 0.059	1	Lapo ran	58.44 3.065	1	Lapo ran	64.28 7.372	

BIDANG										TARGET	DAN PAGI	J INDIKA	TIF TAHU	IN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026			2027			2028			2029			2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	KET
3.27 . 02 . 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Ko	Jumlah peternak (Sapi,Kambin g dan Unggas)		34	pers en	108.0 00.00 0	4	pers en	118.8 00.00 0	7	pers en	130.6 80.00 0	11	pers en	143.7 48.00 0	13	pers en	158.1 22.80 0	15	pers en	173.9 35.08 0	
	Peserta pembinaan yang meningkat populasi ternaknya		10	pers en		2	pers en		2	pers en		3	pers en		5	pers en		6	pers en		
	Persentase peserta bimbingan teknis yang direkomenda sikan untuk dibina		25	pers en		30	pers en		35	pers en		40	pers en		45	pers en		50	pers en		
3.27 . 02 . 2.03 . 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil		1	lapor an	108.0 00.00 0	1	lapor an	118.8 00.00 0	1	lapor an	130.6 80.00 0	1	lapor an	143.7 48.00 0	1	lapor an	158.1 22.80 0	1	lapor an	173.9 35.08 0	

BIDANG URUSAN		Date								TARGET	DAN PAGI	J INDIKA	TIF TAHU	IN							
/PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025	ı		2026			2027			2028	ı		2029	ı		2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAR	:GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAF	:GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	КЕТ
3.27 . 02 . 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase kelahiran insemenasi buatan pada sapi		1,2	pers en	2.060. 529.6 22	1,2	pers en	2.266. 582.5 84	1,2	pers en	2.493. 240.8 43	1,2	pers en	2.742. 564.9 27	1,2	pers en	3.016. 821.4 20	1,2	pers en	3.318. 503.5 62	
	Persentase inseminator bersertifikat ATR		50	pers en		60	pers en		70	pers en		80	pers en		90	pers en		100	pers en		
3.27 . 02 . 2.05 . 06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		1	lapor an	64.80 0.000	1	lapor an	71.28 0.000	1	lapor an	78.40 8.000	1	lapor an	86.24 8.800	1	lapor an	94.87 3.680	1	lapor an	104.3 61.04 8	
3.27 . 02 . 2.05 . 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar		1650	ekor	1.757. 761.1 50	1815	ekor	1.933. 537.2 65	1996, 5	ekor	2.126. 890.9 92	2196, 15	ekor	2.339. 580.0 91	2415, 765	ekor	2.573. 538.1 00	2657, 3415	ekor	2.830. 891.9 10	
3.27 . 02 . 2.05 . 04 Penjaminan Peredaran	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar		7410 0	ton	237.9 68.47 2	8151 0	ton	261.7 65.31 9	8966 1	ton	287.9 41.85 1	9862 7,1	ton	316.7 36.03 6	1084 89,81	ton	348.4 09.64 0	1193 38,79 1	ton	383.2 50.60 4	

BIDANG				2025						TARGET	DAN PAGI	J INDIKA	TIF TAHU	IN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026			2027			2028			2029			2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	KET
HPT, Bahan Pakan/Pakan																					
3.27 . 03 Program Penyediaan Dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	persentase pemenuhan sarana dan prasarana produksi		100,0 0	Pers en	26.43 7.741. 260	100,0 0	Pers en	29.08 1.515. 386	100,0	Pers en	31.98 9.666. 925	100,0 0	Pers en	35.18 8.633. 617	100,0 0	Pers en	38.70 7.496. 979	100,0 0	Pers en	42.57 8.246. 677	
	persentase pemenuhan sarana dan prasarana produksi dengan kondisi baik		85,00	Pers en		85,10	Pers en		85,20	Pers en		85,30	Pers en		85,40	Pers en		85,50	Pers en		
3.27 . 03 . 2.01 Pengembanga n Prasarana Pertanian	Persentase usulan yang di setujui (Persen)		100	Pers en	2.567. 105.0 60	100	Pers en	2.823. 815.5 66	100	Pers en	3.106. 197.1 23	100	Pers en	3.416. 816.8 35	100	Pers en	3.758. 498.5 18	100	Pers en	4.134. 348.3 70	
3.27 . 03 . 2.01 . 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		1	lapor an	450.2 54.70 0	1	lapor an	495.2 80.17 0	1	lapor an	544.8 08.18 7	1	lapor an	599.2 89.00 6	1	lapor an	659.2 17.90 6	1	lapor an	725.1 39.69 7	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan		1	Unit	57.60 0.000	1	Unit	63.36 0.000	1	Unit	69.69 6.000	1	Unit	76.66 5.600	1	Unit	84.33 2.160	1	Unit	92.76 5.376	

BIDANG										TARGET	DAN PAGI	U INDIKA	TIF TAHL	JN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026	1		2027	1		2028			2029	1		2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAR	RGET	PAGU	TAR	RGET	PAGU	TAF	RGET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	:GET	PAGU	TAF	RGET	PAGU	КЕТ
	dan dimanfaatkan																				
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kot a	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B yang dikelola		1	Doku men	1.748. 141.2 60	1	Doku men	1.922. 955.3 86	1	Doku men	2.115. 250.9 25	1	Doku men	2.326. 776.0 17	1	Doku men	2.559. 453.6 19	1	Doku men	2.815. 398.9 81	
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembanga nPrasarana,Sa rana, Kawasan Pertanian		1	Doku men	311.1 09.10 0	1	Doku men	342.2 20.01 0	1	Doku men	376.4 42.01 1	1	Doku men	414.0 86.21 2	1	Doku men	455.4 94.83 3	1	Doku men	501.0 44.31 7	
3.27 . 03 . 2.02Pembangu nan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan jalan Usaha Tani yg diusulkan Masyarakat		100	Pers en	23.87 0.636. 200	100	Pers en	26.25 7.699. 820	100	Pers en	28.88 3.469. 802	100	Pers en	31.77 1.816. 782	100	Pers en	34.94 8.998. 460	100	Pers en	38.44 3.898. 306	

BIDANG				2025						TARGET	DAN PAGI	J INDIKA	TIF TAHU	IN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026			2027			2028			2029			2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAR	RGET	PAGU	TAR	RGET	PAGU	TAF	RGET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	KET
	Persentase pemenuhan jalan produksi yg diusulkan Masyarakat		100	Pers en		100	Pers en		100	Pers en		100	Pers en		100	Pers en		100	Pers en		
3.27 . 03 . 2.02 . 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		55	Unit	21.85 0.540. 000	56	Unit	24.03 5.594. 000	57	Unit	26.43 9.153. 400	58	Unit	29.08 3.068. 740	59	Unit	31.99 1.375. 614	60	Unit	35.19 0.513. 175	
3.27 . 03 . 2.02 . 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		4	Unit	805.0 56.20 0	4	Unit	885.5 61.82 0	5	Unit	974.1 18.00 2	5	Unit	1.071. 529.8 02	6	Unit	1.178. 682.7 82	6	Unit	1.296. 551.0 61	
3.27 . 03 . 2.02 . 01 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara		7	Unit	1.215. 040.0 00	8	Unit	1.336. 544.0 00	9	Unit	1.470. 198.4 00	10	Unit	1.617. 218.2 40	11	Unit	1.778. 940.0 64	12	Unit	1.956. 834.0 70	
3.27 . 04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan	Persentase hewan bebas penyakit		100	pers en	787.2 70.00 0	100	pers en	865.9 97.00 0	100	pers en	952.5 96.70 0	100	pers en	1.047. 856.3 70	100	pers en	1.152. 642.0 07	100	pers en	1.267. 906.2 08	

BIDANG				2025						TARGET	DAN PAGI	J INDIKA	TIF TAHL	JN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026			2027			2028			2029			2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	KET
Kesehatan Masyarakat Veteriner																					
3.27 . 04 . 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	persentase terpenuhinya obat dan vaksin		100,0	pers en	7.836. 400	100,0 0	pers en	8.620. 040	100,0	pers en	9.482. 044	100,0	pers en	10.43 0.248	100,0	pers en	11.47 3.273	100,0	pers en	12.62 0.601	
	Rasio terpenuhinya medis dan paramedis veteriner		100,0	pers en		100,0 0	pers en		100,0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		100,0 0	pers en		
Penanggulanga n Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali		1	lapor an	7.836. 400	1	lapor an	8.620. 040	1	lapor an	9.482. 044	1	lapor an	10.43 0.248	1	lapor an	11.47 3.273	1	lapor an	12.62 0.601	
3.27 . 04 . 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk		100	pers en	69.31 8.200	100	pers en	76.25 0.020	100	pers en	83.87 5.022	100	pers en	92.26 2.524	100	pers en	101.4 88.77 7	100	pers en	111.6 37.65 4	

BIDANG										TARGET	DAN PAG	U INDIKA	TIF TAHL	JN							
/PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025	I		2026	ī		2027	I		2028	ī		2029	ī		2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAF	RGET	PAGU	TAR	RGET	PAGU	TAF	RGET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAF	RGET	PAGU	TAF	RGET	PAGU	KET
Kabupaten/Ko ta	Hewan Daerah Kabupaten/K ota																				
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM		1	lapor an	69.31 8.200	1	lapor an	76.25 0.020	1	lapor an	83.87 5.022	1	lapor an	92.26 2.524	1	lapor an	101.4 88.77 7	1	lapor an	111.6 37.65 4	
3.27 . 04 . 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Ko	Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/K ota terlaksana		100	pers en	399.0 35.40 0	100	pers en	438.9 38.94 0	100	pers en	482.8 32.83 4	100	pers en	531.1 16.11 7	100	pers en	584.2 27.72 9	100	pers en	642.6 50.50 2	
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Penyediaan Pelayanan Jasa Labboratoriu m		3	Unit	399.0 35.40 0	4	Unit	438.9 38.94 0	5	Unit	482.8 32.83 4	6	Unit	531.1 16.11 7	7	Unit	584.2 27.72 9	8	Unit	642.6 50.50 2	

BIDANG										TARGET	DAN PAGI	J INDIKA	TIF TAHU	IN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025	I		2026			2027			2028	ı		2029	ı		2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	ОИТСОМЕ /ОИТРИТ	ne (20 24)	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	RGET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	KET
3.27.04.2.05 Penerapan dan pengawasan persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan	Persentase Pemenuhan persyaratan Teknis Kesejahteraa n hewan		100,0	pers en	311.0 80.00 0	100,0 0	pers en	342.1 88.00 0	100,0 0	pers en	376.4 06.80 0	100,0	pers en	414.0 47.48 0	100,0 0	pers en	455.4 52.22 8	100,0 0	pers en	500.9 97.45 1	
Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan		1	Lapo ran	311.0 80.00 0	1	Lapo ran	342.1 88.00 0	1	Lapo ran	376.4 06.80 0	1	Lapo ran	414.0 47.48 0	1	Lapo ran	455.4 52.22 8	1	Lapo ran	500.9 97.45 1	
3.27 . 05 Program Pengendalian Dan Penanggulanga n Bencana Pertanian	Persentase intensitas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dibawah ambang batas (Tanaman Pangan)		2,5	%	2.632. 827.8 72	2,5	%	2.896. 110.6 59	2,5	%	3.185. 721.7 25	2,5	%	3.504. 293.8 98	2,5	%	3.854. 723.2 87	2,5	%	4.240. 195.6 16	
	Persentase intensitas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dibawah ambang batas (Hortikultura)		1,5	%		1,5	%		1,5	%		1,5	%		1,5	%		1,5	%		

BIDANG				2025						TARGET	DAN PAGI	J INDIKA	TIF TAHU	JN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026			2027			2028			2029			2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAR	:GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	KET
	Persentase intensitas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dibawah ambang batas (Perkebunan)		1,5	%		1,5	%		1,5	%		1,5	%		1,5	%		1,5	%		
3.27 . 05 . 2.01 Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian Kabupaten/Ko ta	Persentase terpenuhinya usulan kelompok tani (Tanaman Pangan)		100	Pers en	2.632. 827.8 72	100	Pers en	2.896. 110.6 59	100	Pers en	3.185. 721.7 25	100	Pers en	3.504. 293.8 98	100	Pers en	3.854. 723.2 87	100	Pers en	4.240. 195.6 16	
	Persentase terpenuhinya usulan kelompok tani (Hortikultura)		100	Pers en		100	Pers en		100	Pers en		100	Pers en		100	Pers en		100	Pers en		
	Persentase terpenuhinya usulan kelompok tani (Perkebunan)		100	Pers en		100	Pers en		100	Pers en		100	Pers en		100	Pers en		100	Pers en		
3.27 . 05 . 2.01 . 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)		36,5	На	729.7 22.87 2	37	На	802.6 95.15 9	37	На	882.9 64.67 5	37	На	971.2 61.14 3	37	На	1.068. 387.2 57	37	На	1.175. 225.9 83	

BIDANG URUSAN		Date								TARGET	DAN PAGI	U INDIKA	TIF TAHL	JN							
/PROGRAM/O UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	Bas eli ne (20 24)	TAF	TARGET PAGU		TAR	2026	PAGU	TAF	2027 RGET	PAGU	TAR	2028 GET	PAGU	TAR	2029	PAGU	TAR	2030	PAGU	KET
(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan																				
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		10	На	1.327. 814.0 00	12	На	1.460. 595.4 00	15	На	1.606. 654.9 40	17	На	1.767. 320.4 34	20	На	1.944. 052.4 77	23	На	2.138. 457.7 25	
Penanggulanga n Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulang an pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		1	Lapo ran	575.2 91.00 0	1	Lapo ran	632.8 20.10 0	1	Lapo ran	696.1 02.11 0	1	Lapo ran	765.7 12.32 1	1	Lapo ran	842.2 83.55 3	1	Lapo ran	926.5 11.90 8	
3.27 . 06 Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perijinan yang dipenuhi	10 0	100	Pers en	210.5 50.00 0	100	Pers en	231.6 05.00 0	100	Pers en	254.7 65.50 0	100	Pers en	280.2 42.05 0	100	Pers en	308.2 66.25 5	100	Pers en	339.0 92.88 1	

BIDANG		Date		2025						TARGET	DAN PAGI	J INDIKA	TIF TAHU	IN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025	1		2026	1		2027	1		2028	1		2029	1		2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAR	GET	PAGU	TAR	:GET	PAGU	TAR	:GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	КЕТ
3.27 . 06 . 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase Penerbitan Izin (Rekomendas i) Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/K ota		100	%	210.5 50.00 0	100	%	231.6 05.00 0	100	%	254.7 65.50 0	100	%	280.2 42.05 0	100	%	308.2 66.25 5	100	%	339.0 92.88 1	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi		1	lapor an	97.29 0.000	1	lapor an	107.0 19.00 0	1	lapor an	117.7 20.90 0	1	lapor an	129.4 92.99 0	1	lapor an	142.4 42.28 9	1	lapor an	156.6 86.51 8	
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		1	lapor an	113.2 60.00 0	1	lapor an	124.5 86.00 0	1	lapor an	137.0 44.60 0	1	lapor an	150.7 49.06 0	1	lapor an	165.8 23.96 6	1	lapor an	182.4 06.36 3	
3.27 . 07 Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani lanjut ke Madya		5,00	Perse n	1.134. 778.8 10	10,00	Perse n	1.248. 256.6 91	15,00	Perse n	1.373. 082.3 60	20,00	Perse n	1.510. 390.5 96	25,00	Perse n	1.661. 429.6 56	30,00	Perse n	1.827. 572.6 21	
	Persentase Penyuluh		35,50	Perse n		40,00	Perse n		45,00	Perse n		50,00	Perse n		55,00	Perse n		60,00	Perse n		

BIDANG										TARGET	DAN PAGI	J INDIKA	TIF TAHL	JN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026			2027			2028			2029			2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAR	RGET	PAGU	TAR	:GET	PAGU	TAF	:GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	KET
	yang berkompeten																				
3.27 . 07 . 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	persentase peserta bimbingan teknis penyuluhan yang mendapatkan sertifikat		100	Pers en	1.134. 778.8 10	100	Pers en	1.248. 256.6 91	100	Pers en	1.373. 082.3 60	100	Pers en	1.510. 390.5 96	100	Pers en	1.661. 429.6 56	100	Pers en	1.827. 572.6 21	
	Persentase Media penyuluhan yang distribusikan		100	Pers en		100	Pers en		100	Pers en		100	Pers en		100	Pers en		100	Pers en		
	persentase peserta bimbingan teknis dengan nilai postes baik		73	Pers en		75	Pers en		78	Pers en		80	Pers en		83	Pers en		85	Pers en		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1	unit	387.8 63.20 0	1	unit	426.6 49.52 0	1	unit	469.3 14.47 2	1	unit	516.2 45.91 9	1	unit	567.8 70.51 1	1	unit	624.6 57.56 2	
Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang		35	unit	64.72 7.000	35	unit	71.19 9.700	35	unit	78.31 9.670	35	unit	86.15 1.637	35	unit	94.76 6.801	35	unit	104.2 43.48 1	

BIDANG										TARGET	DAN PAGI	J INDIKA	TIF TAHL	JN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026			2027			2028			2029			2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAF	RGET	PAGU	TAR	RGET	PAGU	TAF	GET	PAGU	TAR	:GET	PAGU	TAR	:GET	PAGU	TAR	RGET	PAGU	КЕТ
	Ditingkatkan Kapasitasnya																				
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana danPrasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yg dimanfaatkan		23	unit	64.28 3.000	23	unit	70.71 1.300	23	unit	77.78 2.430	23	unit	85.56 0.673	23	unit	94.11 6.740	23	unit	103.5 28.41 4	
Pembentukan dan Penyelenggara an Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Ko	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		28	unit	230.0 74.40 0	29	unit	253.0 81.84 0	30	unit	278.3 90.02 4	31	unit	306.2 29.02 6	32	unit	336.8 51.92 9	33	unit	370.5 37.12 2	
Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk		1	unit	3.398. 800	1	unit	3.738. 680	1	unit	4.112. 548	1	unit	4.523. 803	1	unit	4.976. 183	1	unit	5.473. 801	
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlahpenyul uhpertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya		5	oran g	152.7 00.00 0	5	oran g	167.9 70.00 0	5	oran g	184.7 67.00 0	5	oran g	203.2 43.70 0	5	oran g	223.5 68.07 0	5	oran g	245.9 24.87 7	
Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Ko ta	Jumlahkelem bagaanpenyul uhan pertanian di tingkat kabupaten/ko		1	Unit	203.9 40.00 0	1	Unit	224.3 34.00 0	1	Unit	246.7 67.40 0	1	Unit	271.4 44.14 0	1	Unit	298.5 88.55 4	1	Unit	328.4 47.40 9	

BIDANG										TARGET	DAN PAGI	J INDIKA	TIF TAHU	IN							
URUSAN /PROGRAM/O	INDIKATOR	Bas eli		2025			2026			2027			2028			2029			2030		
UTCOME/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME /OUTPUT	ne (20 24)	TAF	RGET	PAGU	TAR	RGET	PAGU	TAF	RGET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	TAR	GET	PAGU	КЕТ
	tayangditingk atkan kapasitasnya																				
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis,sosial,e konomidanin ovasi pertanian		1	Doku men	27.79 2.410	1	Doku men	30.57 1.651	1	Doku men	33.62 8.816	1	Doku men	36.99 1.698	1	Doku men	40.69 0.867	1	Doku men	44.75 9.954	
					61.20 4.142. 398			67.32 4.556. 638			74.05 7.012. 302			81.46 2.713. 532			89.60 8.984. 885			98.56 9.883. 373	



4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapin dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin setiap tahunnya. Hal itu ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indicator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra SKPD dapat tercapai.

Dari uraian tentang Tujuan dan Sasaran pembangunan pertanian yang ingin dicapai selama periode 2025-2029 ditetapkan beberapa indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapin sebagaimana tersaji dalam Tabel Penetapan Indikator Kinerja Dinas Terhadap Capaian Kinerja Pembangunan sebagaimana terlampir.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja untuk SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapin dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.14 Indikator Kinerja Dinas Pertanian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra

INDIKATOR	Satua n	Base Line			TAR	GET			HASIL
KINERJA UTAMA		202 4	202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	AKHI R
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9
LPE subkategori pertanian peternakan perburuan dan jasa pertanian (Persen)	Persen	2,71	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30	18,00
Persentase peningkatan Produksi Padi (Persen)	Persen	4,50	1,50	1,51	1,52	1,53	1,54	1,55	9,15
Persentase peningkatan Produksi Cabai Rawit Hiyung (Persen)	Persen	3,35	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	16,5
Persentase peningkatan Produksi Jahe (Persen)	Persen	4,39	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	5,00	28,5
Persentase peningkatan Produksi Jeruk (Persen)	Persen	- 17,7 8	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	4,5
Persentase peningkatan Produksi Karet (Persen)	Persen	1,82	2,10	2,20	2,30	2,30	2,40	2,50	13,8
Persentase peningkatan Produksi Kelapa Sawit (Persen)	Persen	31,9 9	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	19,5
Persentase peningkatan Produksi Daging (Persen)	Persen	31,5 2	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	19,5

INDIKATOR	Satua n	Base Line			TAR	GET			HASIL
KINERJA UTAMA		202 4	202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	AKHI R
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9
Persentase peningkatan Produksi Telur (Persen)	Persen	24,1 0	5,00	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	31,5
Persentase peningkatan kelompoktani yg meningkatkan nilai tambah produk pertanian (Persen)	Persen	13,9 9	15,0 0	17,0 0	19,0 0	21,0 0	23,0 0	25,0 0	25,00
Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Skor)	Skor	76,4 0	81,0 0	81,5 0	82,0 0	83,5 0	84,0 0	84,5 0	84,50
Indeks Profesionalism e ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah (Skor)	Skor	-	80,0 0	80,3 0	80,7 0	90,1	90,3	90,5 0	90,50

Tabel 4.15 Indikator Kinerja Bidang Urusan Dinas Pertanian

N O.	INDIKATO R KINERJA KUNCI	SATU AN	KON AW	DISI AL			TAR	GET			KOND ISI AKHI
<u> </u>			20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30	R
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	IKK OUTCOME										
1	Produktivit as pertanian per hektar per tahun (Ton/Ha)		5,1	5,1 4	5,1 5	5,1 6	5,1 7	5,1 8	5,1 9	5,2 0	5,20

N O.	INDIKATO R KINERJA	SATU AN	KON AW	DISI AL			TAR	GET			KOND ISI AKHI
0.	KUNCI	7114	20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30	R
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular		100	100	100	100	100	100	100	100	100
II	IKK OUTPUT										
1	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan		41	126	75	75	75	75	75	75	450
2	Prasarana pertanian yang digunakan		41	64	75	75	75	75	75	75	450
3	Penerbitan izin usaha pertanian		100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase prasarana yang digunakan		100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota		100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase fasilitasi penanggula ngan bencana		100	100	100	100	100	100	100	100	100

4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Program	Outcome Kinerja	Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	
	Penguatan pengembangan sumber daya manusia yang sehat dan kompetitif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% 2.Perencanaan Kinerja (AKIP) Pengukuran Kinerja (AKIP)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	sebagai pilar utama dalam mewujudkan	Kabupaten/Kota	3.Pelaporan Kinerja (AKIP) 4.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 5.Persentase Hasil Temuan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	pembangunan daerah yang berkelanjutan		Pemeriksaan yang ditindaklanjuti 6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pembenahan system distribusi bahan pokok dan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Luas panen Padi Produktivitas Padi Jumlah Luas Panen Cabe Rawit hiyung	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
	sistem logistik rantai persediaan		Jumlah Luas Panen Jahe Jumlah Luas Panen Jeruk Produktivitas Cabai Rawit	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			Hiyung Produktivitas jahe	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
			Produktivitas Jeruk Jumlah Luas panen Karet Jumlah Luas panen Kelapa Sawit Sawit		
			Produktivitas Karet Produktivitas Kelapa Sawit Populasi Ternak Sapi Populasi Ternak Kambing	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			Populasi Ternak Unggas persentase kelompok tani yang melakukan pasca panen Tanaman Pangan persentase kelompok tani yang melakukan pasca panen Hortikultura persentase kelompok tani yang melakukan pasca panen Perkebunan	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase pemenuhan sarana dan prasarana produksi persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
		1 Citaman	produksi dengan kondisi baik	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
		Program Pengendalian Kesehatan	Persentase hewan bebas penyakit	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	8
		Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	

No	Prioritas Daerah	Program	Outcome Kinerja	Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	
				Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	
	Mengoptimalkan pengawasan yang berpotensi degradasi	Program Pengendalian Dan Penanggulangan	Persentase intensitas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dibawah ambang batas	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
	lingkungan hidup	Bencana Pertanian	(Tanaman Pangan) Persentase intensitas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dibawah ambang batas (Hortikultura) Persentase intensitas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dibawah ambang batas (Perkebunan)	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
	Peningkatan iklim investasi daerah	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perijinan yang dipenuhi	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis	
	Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani lanjut ke Madya Persentase Penyuluh yang berkompeten	Izin Usaha Pertanian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Penguatan Kelembagaan	
				penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 maka Dinas Pertanian Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi Dinas Pertanian dan akan dilakukan review bahkan perubahan apabila ada hal yang perlu terkait dinamisnya fakta dan kinerja dalam upaya mencapai tujuan Dinas Pertanian dan Visi Misi Kabupaten Tapin. Efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Dinas Pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan konstribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Dinas Pertanian diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi.

BUPATI TAPIN

YAMANI

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PERIODE 2026 – 2030 DINAS PERTANIAN KABUPATEN TAPIN

NO	INDUCATOR	CATHAN	OTATUO	TARGET			TARGET			мории	KODE OKDO	OUMPED	TIPE	CATATAN
NO	INDIKATOR	SATUAN	STATUS	AWAL	2026	2027	2028	2029	2030	MODUL	KODE SKPD	SUMBER	DATA	CATATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1,	LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	%	Kumulatif	2,74	3,35	3,38	3,42	3,46	3,5	TUJUAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	MASTER	numeric	
2,	persentase peningkatan produksi jahe	%	Kumulatif	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	SASARAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	MASTER	numeric	
3,	persentase peningkatan produksi Padi	%	Kumulatif	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	SASARAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	MASTER	numeric	
4,	persentase peningkatan produksi Karet	%	Kumulatif	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	SASARAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	MASTER	numeric	
5,	Persentase peningkatan produksi Cabai Rawit Hiyung	%	Kumulatif	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	SASARAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	MASTER	numeric	
6,	persentase peningkatan produksi Jeruk	%	Kumulatif	0,01	0,30	0,50	0,90	1,00	1,30	SASARAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	MASTER	numeric	
7,	persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit	%	Kumulatif	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	SASARAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	MASTER	numeric	
8,	persentase peningkatan produksi daging	%	Kumulatif	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	SASARAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	MASTER	numeric	
9,	persentase peningkatan produksi telur	%	Kumulatif	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	SASARAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	MASTER	numeric	
10,	persentase peningkatan kelompok tani yang meningkatkan nilai tambah produk pertanian	%	Positip	14,10	14,30	14,60	14,80	15,00	15,20	SASARAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	MASTER	numeric	
11,	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Positip	81,00	81,50	81,75	82,00	82,50	82,75	SASARAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	MASTER	numeric	
12,	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	skor	Positip	80,00	80,30	80,70	90,10	90,30	90,50	SASARAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	MASTER	numeric	

SUBKEGIATAN RENSTRA PERIODE 2026 - 2030 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	KODE	URAIAN			PAGU			CATATAN
NO	KODE	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030	CATATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1,	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.320.000,00	74.052.000,00	81.457.200,00	89.602.920,00	98.563.212,00	
2,	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.485.797.421,00	19.234.377.164,00	21.157.814.880,00	23.273.596.368,00	25.600.956.005,00	
3,	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	110.893.310,00	121.982.641,00	134.180.905,00	147.598.996,00	162.358.895,00	
4,	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.410.330,00	173.151.363,00	190.466.499,00	209.513.149,00	230.464.464,00	
5,	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	445.495.160,00	490.044.676,00	579.049.144,00	592.954.058,00	652.249.464,00	
6,	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	88.099.110,00	96.909.021,00	106.599.923,00	117.259.915,00	128.985.907,00	
7,	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	55.049.060,00	60.553.966,00	66.609.363,00	73.270.299,00	80.597.329,00	
8,	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.962.020,00	20.858.222,00	22.944.044,00	25.238.449,00	27.762.239,00	
9,	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.501.799.200,00	1.651.979.120,00	1.817.177.032,00	1.998.894.735,00	2.198.784.209,00	
10,	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.182.663.899,00	1.300.930.289,00	1.431.023.317,00	1.574.125.650,00	1.731.538.268,00	
11,	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	720.151.705,00	792.166.875,00	871.383.563,00	958.521.919,00	1.054.374.111,00	
12,	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	501.814.456,00	551.995.902,00	607.195.492,00	667.915.041,00	734.706.545,00	
13,	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	541.910.727,00	596.101.799,00	655.711.979,00	721.283.177,00	793.411.495,00	

14,	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.424.492,00	36.766.941,00	40.443.636,00	44.487.999,00	48.936.799,00	
15,	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.713.730.855,00	2.985.103.941,00	3.283.614.335,00	3.611.975.768,00	3.973.173.345,00	
16,	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.319.669.221,00	3.651.636.143,00	4.016.799.757,00	4.418.479.733,00	4.860.327.706,00	
17,	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	512.600.391,00	563.860.430,00	620.246.473,00	682.271.120,00	750.498.232,00	
18,	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	116.420.040,00	128.062.044,00	140.868.248,00	154.955.073,00	170.450.581,00	
19,	3.27.02.2.01.0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	135.820.080,00	149.402.088,00	164.342.297,00	180.776.526,00	198.854.179,00	
20,	3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	404.898.780,00	445.388.658,00	489.927.524,00	538.920.276,00	592.812.304,00	
21,	3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	423.830.880,00	466.213.968,00	512.835.365,00	564.118.901,00	620.530.791,00	
22,	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	34.019.040,00	37.420.944,00	41.163.038,00	45.279.342,00	49.807.276,00	
23,	3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	43.909.140,00	48.300.054,00	53.130.059,00	58.443.065,00	64.287.372,00	
24,	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	118.800.000,00	130.680.000,00	143.748.000,00	158.122.800,00	173.935.080,00	
25,	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	261.765.319,00	287.941.851,00	316.736.036,00	348.409.640,00	383.250.604,00	
26,	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	71.279.999,00	78.407.999,00	86.248.799,00	94.873.679,00	104.361.047,00	
27,	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	1.933.537.265,00	2.126.890.992,00	2.339.580.091,00	2.573.538.100,00	2.830.891.910,00	
28,	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	495.280.170,00	544.808.187,00	599.289.006,00	659.217.906,00	725.139.697,00	

29,	3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	63.360.000,00	69.696.000,00	76.665.600,00	84.332.160,00	92.765.376,00	
30,	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	1.922.955.386,00	2.115.250.925,00	2.326.776.017,00	2.559.453.619,00	2.815.398.981,00	
31,	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	342.220.010,00	376.442.011,00	414.086.212,00	455.494.833,00	501.044.317,00	
32,	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	24.035.594.000,00	26.439.153.400,00	29.083.068.740,00	31.991.375.614,00	35.190.513.175,00	
33,	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	885.561.820,00	974.118.002,00	1.071.529.802,00	1.178.682.782,00	1.296.551.061,00	
34,	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.336.543.998,00	1.470.198.398,00	1.617.218.238,00	1.778.940.062,00	1.956.834.060,00	
35,	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	8.620.040,00	9.482.044,00	10.430.248,00	11.473.273,00	12.620.601,00	
36,	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	76.250.020,00	83.875.022,00	92.262.524,00	101.488.777,00	111.637.654,00	
37,	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	438.938.940,00	482.832.834,00	531.116.117,00	584.227.729,00	642.650.502,00	
38,	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	44.995.300,00	49.995.300,00	54.995.300,00	59.995.300,00	64.995.300,00	
39,	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	297.192.700,00	326.411.500,00	359.052.180,00	395.456.928,00	436.002.151,00	
40,	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	802.695.159,00	882.964.675,00	971.261.143,00	1.068.387.257,00	1.175.225.983,00	

		Hortikultura, dan Perkebunan						
41,	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.460.595.400,00	1.606.654.940,00	1.767.320.434,00	1.944.052.477,00	2.138.457.725,00	
42,	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	632.820.100,00	696.102.110,00	765.712.321,00	842.283.553,00	926.511.908,00	
43,	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	124.586.000,00	137.044.600,00	150.749.060,00	165.823.966,00	182.406.363,00	
44,	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	107.019.000,00	117.720.900,00	129.492.990,00	142.442.289,00	156.686.518,00	
45,	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	426.649.520,00	469.314.472,00	516.245.919,00	567.870.511,00	624.657.562,00	
46,	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	71.199.700,00	78.319.670,00	86.151.637,00	94.766.801,00	104.243.481,00	
47,	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	70.711.300,00	77.782.430,00	85.560.673,00	94.116.740,00	103.528.414,00	
48,	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	253.081.840,00	278.390.024,00	306.229.026,00	336.851.929,00	370.537.122,00	
49,	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	167.970.000,00	184.767.000,00	203.243.700,00	223.568.070,00	245.924.877,00	
50,	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	224.334.000,00	246.767.400,00	271.444.140,00	298.588.554,00	328.447.409,00	
51,	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	3.738.680,00	4.112.548,00	4.523.803,00	4.976.183,00	5.473.801,00	
52,	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	30.571.651,00	33.628.816,00	36.991.698,00	40.690.867,00	44.759.954,00	

